

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023
(Studi Pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

**HANIFAH SASABELA
NPM 2116021071**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023
(Studi Pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung**

Oleh:

HANIFAH SASABELA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 (Studi Pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)

Oleh

Hanifah Sasabela

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat terkait, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan program-program yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan anggaran yang tidak mencukupi. Selain itu, komunikasi antara lembaga pelaksana belum berjalan secara efektif dan konsisten, menyebabkan terjadinya miskomunikasi dalam pelaksanaan program. Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan juga masih belum merata, di mana sebagian besar pelaksana menunjukkan kurangnya inisiatif dan keterlibatan aktif. Struktur birokrasi yang kaku dan berjenjang memperlambat koordinasi serta proses pengambilan keputusan. Padahal, kemiskinan sebagai isu multidimensional membutuhkan respons yang cepat dan kolaboratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keterpaduan komunikasi yang efektif, kecukupan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang adaptif. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan alur birokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan, Edward III, Sumber Daya, Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POVERTY ALLEVIATION POLICY IN BANDAR LAMPUNG CITY IN 2023

(A Study at BAPPERIDA Bandar Lampung City)

By

Hanifah Sasabela

This study aims to analyze the implementation of poverty alleviation policies in Bandar Lampung City in 2023 using George C. Edward III's policy implementation theory, which emphasizes four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through field observation, in-depth interviews with relevant officials, and documentation of policy and program implementation. The findings indicate that the policy implementation has not been optimal. A key obstacle is the limited availability of competent human resources and insufficient budget allocation. Moreover, communication among implementing agencies is often ineffective and inconsistent, leading to miscoordination in program execution. The disposition or commitment of policy implementers also varies, with some showing a lack of initiative and active involvement. The bureaucratic structure is rigid and hierarchical, delaying coordination and decision-making processes. Given that poverty is a multidimensional issue, it requires rapid and collaborative responses. This study concludes that the success of policy implementation depends heavily on integrated and effective communication, adequate resource availability, strong implementer commitment, and a flexible bureaucratic structure. The study recommends strengthening human resource capacity, streamlining bureaucratic procedures, enhancing community participation, and reinforcing monitoring and evaluation systems. These improvements are essential to ensure that poverty alleviation programs are executed effectively, efficiently, and targeted to those who need them most. By addressing these critical factors, local governments can significantly reduce poverty levels and promote sustainable community welfare.

Keywords: Policy Implementation, Poverty Alleviation, Edward III, Resources, Bandar Lampung City

Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandar Lampung 2023 (Studi
pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Hanifah Sasabela**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021071**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Tabah Maryanah
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Darmawan Purba, S. IP, M. IP.**



Penguji Utama : **Himawan Indrajat, S.IP,M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Juli 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



Hanifah Sasabela
NPM 2116021071

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hanifah Sasabela, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 31 Januari 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Hasjim Dajang dan Ibu Sutami. Penulis memiliki seorang kakak bernama Julio Hartanto. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 02 Rawa Laut Kota Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Kartika II-2 Bandar

Lampung, dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMAN 10 Bandar Lampung pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Dalam bidang organisasi, penulis bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan dan dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Bendahara.

Selain aktif dalam organisasi kemahasiswaan, penulis juga mengikuti program magang di beberapa instansi pemerintahan, yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFOTIK) Provinsi Lampung serta di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2023, penulis juga mendapatkan kesempatan mengikuti program pertukaran pelajar ke Malaysia, yang memberikan pengalaman berharga dalam memperluas wawasan, keterampilan, serta pemahaman terhadap dinamika global dan kerja lintas budaya.

Berbagai pengalaman tersebut telah memperkaya pengetahuan dan kemampuan penulis, serta menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan profesional ke depan.

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

"Inna ma'al 'usri yusraa."

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan bagimu.”

“Wa qāla rabbukum ud‘ūnī astajib lakum”

(QS.Ghafir;60)

"Hidup harus terus berjalan, bahkan saat segalanya terasa ingin hilang. Tetaplah melangkah di jalan yang benar, meski langkah terasa berat."

(Hanifah Sasabela)



Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir
dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk ...

Kedua Orang Tuaku, Papa Afat dan Mama Tami yang tanpa lelah memberikan cinta, doa,
dan pengorbanan tak terhingga. Kepada sahabat-sahabat yang selalu hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat di setiap langkah. Juga kepada para dosen dan semua yang telah mendukung, memberi ilmu, dan menjadi inspirasi.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung 2023 (Studi pada Bapperida Kota Bandar Lampung)”. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Bendi Juantara, S.IP.,M.A Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, sejak awal hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.bsimbingan, arahan, koreksi, dan motivasi yang diberikan bukan hanya menjadi petunjuk akademik, tetapi juga menjadi pelajaran berharga dalam membentuk sikap ilmiah dan ketekunan dalam menyelesaikan setiap proses. Semoga segala ilmu, waktu, dan ketulusan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
9. Bapak Himawan Indrajat, S.I.P.,M.S.i selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam memberikan masukan, kritik, serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.Segala bentuk evaluasi dan arahan yang diberikan sangat berarti bagi penulis, tidak hanya dalam penyusunan karya ilmiah ini, tetapi juga sebagai bekal berharga dalam perjalanan akademik dan profesional di masa mendatang. Semoga kebaikan dan ilmu yang Bapak/Ibu berikan senantiasa mendapat balasan yang mulia dari Allah SWT.
10. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Mba Sela dan Ibu Merta, selaku staf jurusan yang selalu sigap dan ramah dalam membantu segala keperluan administrasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan, bantuan, dan keramahan yang diberikan telah sangat membantu kelancaran proses akademik penulis. Semoga kebaikan dan ketulusan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu

persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Penulis sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Penulis.

12. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Diding Sagita, S.E., M.M selaku Lurah Penengahan Raya, Ibu Dra. R.R. Diah Sulistiorini, M.Si selaku Kepala Bidang Pembangunan Pemerintahan dan Manusia BAPPERIDA Kota Bandar Lampung, Ibu Niken Adelia, S.Ak selaku staf BAPPERIDA, serta Bapak Santoso Adhy S., S.E., M.M selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan data yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Waktu, informasi, dan wawasan yang telah diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh pemahaman yang mendalam terkait topik penelitian. Semoga segala kebaikan, kesediaan, dan kontribusi yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT..
13. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Papa tercinta, atas segala nasihat, kerja keras, dan semangat yang selalu PapaAfat tanamkan. Terima kasih karena telah menjadi teladan dalam keteguhan, tanggung jawab, dan kesabaran. Doa dan dukungan Papa telah menjadi kekuatan tersendiri dalam setiap proses yang penulis jalani. Tak lupa, rasa terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Mama Tami tersayang, yang selalu menyelimuti langkah penulis dengan doa, cinta tanpa syarat, serta perhatian yang tak pernah surut. Terima kasih atas pelukan hangat di kala lelah, dan doa tulus yang tak pernah absen mengiringi setiap perjuangan.
Semoga Allah SWT membalas segala kasih sayang, pengorbanan, dan kebaikan Papa dan Mama dengan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan yang berlimpah di dunia dan akhirat.
14. Kepada koko Julio Hartanto, S.I.Kom, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh perjalanan akademik ini. Kehadiran Koko sebagai kakak yang selalu

memberikan nasihat, dorongan, serta membantu dalam berbagai hal, menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan perhatian yang telah diberikan dibalas dengan keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan yang berlimpah.

15. Kepada sepupuku, Fian krisvedianto dan Vanessa Desybel, BBA yang biasa penulis panggil koko fian dan cece nesa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu hadir dalam setiap langkah, memberikan semangat, dan menjadi tempat berbagi cerita di tengah kesibukan masing-masing. Meskipun kini harus berpisah jarak Cece Nesa yang melanjutkan studi ke luar negeri dan Koko Fian yang bekerja di luar kota kenangan dan kebersamaan yang telah terjalin akan selalu penulis kenang. Semoga Koko dan Cece senantiasa diberikan kelancaran, kesuksesan, dan kebahagiaan di setiap perjalanan hidupnya.

16. Kepada Helena dea Melinda, S.H yang akrab disapa Mba Dea, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran mba dea sangat berarti bagi penulis, tidak hanya sebagai teman berdiskusi, tetapi juga sebagai penyemangat di saat penulis merasa lelah dan ragu. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis memahami arah penulisan dengan lebih baik. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang diberikan dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan. *God bless you*, tuhan menyertai mba dea dan keluarga.

17. Kepada Sarah Indriyani dan Rosa Novianti, Kalian bukan hanya adik sepupu, tapi juga bagian dari warna dalam hidup penulis. Terima kasih sudah menjadi adik yang begitu baik, perhatian, dan selalu ada di banyak momen—baik yang serius maupun yang penuh canda. Meski terkadang menyebalkan (dan kalian pasti tahu itu), kehadiran kalian tetap jadi hal yang menyenangkan. Kalian adalah dua sosok kecil yang tumbuh menjadi teman dekat, tempat berbagi cerita, tawa, bahkan diam-diam jadi penghibur saat

hati sedang tidak baik-baik saja. Semoga kedekatan ini tak lekang oleh waktu, dan rasa sayang ini terus tumbuh, bahkan tanpa perlu banyak kata.

18. Kepada sahabat-sahabat liburanku: Alica, Anisa, Dipa, Sisi, Idan, Rakha, dan Rehan, Terima kasih sudah jadi bagian dari masa-masa seru yang cuma datang saat liburan. Meski kita jarang ketemu, setiap kali kumpul selalu ada tawa, cerita, dan kenangan baru. Kalian bukan cuma teman main saat libur, tapi juga bagian dari perjalanan hidup yang tak akan terlupakan. Semoga pertemanan ini tetap terjaga, walau waktu dan kesibukan terus berjalan. Terima kasih dari hati yang paling dalam. Dari penulis, untuk kalian yang selalu spesial.
19. Kepada Amelia Mudia Putri, S.H. dan Rachel Zeasahara Azzarine, A.Md.Keb., yang akrab di sapa Amel dan Rachel terima kasih telah menjadi dua sosok yang hadir di saat penulis terjatuh, tersesat dalam pikiran sendiri, dan dikelilingi kesedihan yang sulit dijelaskan. Kalian tidak datang dengan jawaban, tapi dengan telinga yang mendengar dan hati yang memahami. Di tengah lelah dan luka yang tak terlihat, kalian menjadi tempat berlabuh sederhana, tapi berarti. Mungkin persahabatan kita penuh canda dan ledakan, kadang terasa absurd, bahkan seperti "*fake friend*", tapi justru di balik semua itu, ada kehangatan yang nyata. Terima kasih sudah tinggal, saat yang lain hanya menonton dari jauh. Untuk semua tawa, pelukan diam, dan waktu yang kalian beri penulis mengucapkan terima kasih, lebih dari yang bisa diucapkan.
20. Kepada Rangga Prasetya dan Febian Arohim Wildan, Terima kasih sebesar besarnya atas kebersamaan yang kalian berikan sejak masa SMA hingga kuliah. Terima kasih telah menemani penulis di kala sedih, bingung, dan kehilangan arah, serta selalu hadir dengan nasihat dan semangat yang tulus. Kalian bukan hanya sahabat di masa senang, tapi juga di masa sulit. Kehadiran kalian adalah salah satu bagian terindah dalam perjalanan hidup ini. Semoga persahabatan ini tetap abadi, meski langkah kita nantinya berbeda arah.
21. Kepada grup Sehati: Opung Yanti, Oti, Mbak Niken, dan Mbak Indah, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala

bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan selama masa magang. Terima kasih telah menerima penulis bukan hanya sebagai rekan, tetapi seperti anak dan adik sendiri. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan kehangatan yang telah kalian berikan dibalas oleh Tuhan dengan keberkahan yang berlipat ganda. Dengan hormat dan penuh rasa syukur, Terima kasih dari hati terdalam

22. Kepada Karen Savitri, sahabat perjuanganku sejak awal jalan panjang ini dimulai. Kita pernah dipandang sebelah mata, diremehkan karena nilai *try out* yang kecil, bahkan sempat ragu pada diri sendiri. Tapi kita tidak menyerah. Kita terus melangkah, saling menyemangati, dan akhirnya berhasil masuk jurusan Ilmu Pemerintahan lewat jalur SBMPTN sesuatu yang dulu terasa jauh, tapi kini nyata. Kamu adalah teman pertama yang menyambutku di jurusan ini. Bersama kamu, langkah awal terasa tidak sendiri. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan, tempat berbagi gelisah dan tawa, dan bukti nyata bahwa usaha tak pernah mengkhianati hasil. Perjalanan kita belum selesai, tapi aku yakin sepanjang apapun jalannya, kita sudah membuktikan: mimpi bisa dicapai, asal dijalani Bersama.
23. Kepada Gianin Cahya Damara, Terima kasih telah menjadi teman sekelas yang bukan hanya hadir di ruang kuliah, tapi juga hadir di hati sebagai sahabat sejati. Terima kasih sudah mengerti penulis di saat sedih, susah, dan malas berjuang. Di kala semangat menurun, kamu hadir dengan perhatian, dukungan, Gia, terima kasih atas semua masukan, candaan, dan kesabaranmu. Kehadiranmu membuat hari-hari kuliah tak terasa seberat itu. Semoga kebaikan dan ketulusanmu dibalas dengan kebahagiaan yang berlipat ganda.
24. Kepada Sisya Pristhysila, yang akrab kusapa kakak, Terima kasih bukan hanya karena telah hadir dalam hidup penulis, tapi karena telah berperan jauh lebih dari sekadar teman. Di saat penulis merasa kehilangan arah, kamu hadir seperti seorang kakak menuntun, menguatkan, dan mengingatkan tanpa menghakimi. Terima kasih telah menjadi tempat pulang ketika hati sedang lelah, menjadi sandaran kala penulis ingin menyerah, dan menjadi suara

yang menenangkan di tengah riuhnya kebimbangan. Dalam banyak hal, kamu bukan hanya sahabat. Kamu adalah kakak yang tidak lahir dari darah yang sama, tapi tumbuh bersama dalam rasa yang nyata. Terima kasih, Kak untuk segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang kamu beri dengan tulus. Semoga kebaikan dan peranmu dalam hidup ini selalu kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan berlipat ganda.

25. Kepada Desta Putri Rizki, Anita Apriliani dan Mauzelinda Untuk kalian yang hidupnya selalu penuh semangat semeriah playlist DJ tanpa jeda. Terima kasih sudah mengingatkan bahwa hidup tak selalu harus serius. Kadang, kita memang butuh sedikit hiburan dan tawa agar tetap waras.
26. Kepada NIM 052003506, dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini, Tuhan mengirimkan satu sosok yang tak pernah penulis duga, kamu bukan sebagai orang yang datang dengan janji manis, tapi sebagai seseorang yang hadir diam-diam, tetap tinggal, dan perlahan menjadi tempat paling aman untuk pulang. Kamu bukan hanya sekadar teman yang menemani langkah, tapi seseorang yang menyayangi penulis dengan cara paling tenang dan tak banyak kata kamu seorang yang pekerja keras dan selalu mengusahkan keinginan penulis, Di kala sedih, kamu hadir tanpa diminta. Di saat bingung, kamu tak menyuruh, tapi menemani. Dan ketika dunia terasa berisik, kamu menjadi diam yang menenangkan. bukan kata-kata besar yang membuatmu berarti, tapi kehadiranmu yang konsisten di saat banyak orang memilih pergi. Terima kasih telah menyayangi penulis dengan tulus, dengan cara yang sederhana tapi sangat berarti.
27. Kepada Reksateq terdiri dari, Ghifari, Anita, Andhika, Aryo, Bisma, Biya, Desta, Sisya, Fairuz, Gianin, Ira, Jahdir, Mojel, Vania, Refina, Rafli, Rehan, dan Wahyu, Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kalian semua sahabat-sahabat luar biasa yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kita bukan hanya berbagi ruang kelas dan tugas-tugas yang melelahkan, tapi juga tawa, air mata, semangat, dan ribuan kenangan kecil yang kini terasa begitu berharga. Terima kasih telah hadir di setiap momen, dalam suka maupun duka, dalam lelah maupun gelak tawa. Kalian bukan sekadar teman kuliah, kalian adalah keluarga. Keluarga yang tak terikat oleh

darah, tapi oleh perjalanan panjang yang kita tempuh bersama. Di tengah tekanan, kesibukan, dan segala kebingungan di masa transisi menuju dewasa, kalian hadir sebagai penguat yang tak tergantikan. Semoga persahabatan ini tidak berakhir di ruang kampus, melainkan terus tumbuh, kemanapun hidup membawa kita nanti. Terima kasih, dari hati yang paling dalam. Untuk kalian semua keluarga terbaik di masa kuliah ini.

28. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Angkatan 2021 “*Viva Governancia*”.
29. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
30. *Last but not least*, Terima kasih telah bertahan, saat semua terasa ingin menyerah. *You’ve been through so much, but you’re still here*. Untuk setiap luka yang kamu sembuhkan sendiri, *you did well. I’m proud of you*.

Bandar Lampung, 08 Juli 2025

Peneliti

Hanifah Sasabela

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penelitian Terdahulu	10
1.3. Rumusan Masalah.....	13
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.6. Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Konsep Kebijakan Pemerintah.....	15
2.1.1. Definisi Kebijakan.....	15
2.1.2. Peraturan Kebijakan	17
2.1.3. Kebijakan Publik	19
2.1.4 Tahapan- tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik	21
2.1.5. Implementasi Kebijakan.....	23
2.2. Pemerintah Daerah.....	25
2.2.1. Definisi Pemerintah Daerah	25
2.2.2. Organisasi Perangkat Daerah	27
2.3. Definisi Kemiskinan	28
2.3.1. Bentuk bentuk kemiskinan	29
2.3.2. Faktor penyebab kemiskinan.....	30
2.4. Kerangka Pikir	33

III. METODE PENELITIAN	36
3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Sumber Data	40
3.5 Informan Penelitian.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Teknik Pengolahan Data	44
3.8 Teknik Validasi Data	44
IV. GAMBARAN UMUM	46
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	46
4.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.....	49
4.2.1 Tugas dan Fungsi	51
4.2.2 Struktur Organisasi	63
4.3 Gambaran Umum Dinas Sosial.....	64
4.3.1 Tugas dan Fungsi	65
4.3.2 Struktur Organisasi	71
4.4 Gambaran Umum Kelurahan penenggalahan raya.....	72
4.4.1 Tugas Dan Fungsi.....	74
4.4.2 Struktur Organisasi	78
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	80
5.1.Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung tahun 2023.....	80
5.2. Evaluasi Implementasi Berdasarkan Variabel Menurut Teori George Edward III	89
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	111
6.1 Kesimpulan	111
6.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Grafik Presentase Posisi Relatif Penduduk Miskin	2
Gambar 2 Angka Kemiskinan di Kota Bandar Lampung	9
Gambar 3 Tahapan Kebijakan Publik.....	23
Gambar 4. Tahapan Formulasi Kebijakan	23
Gambar 5 Kerangka Pikir	35
Gambar 6. Alur Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan oleh BAPPERIDA Kota Bandar Lampung Berdasarkan Teori George Edward III"	39
Gambar 7 Peta kota bandar lampung	44
Gambar 8 Struktur organisasi bapperida.....	63
Gambar 9 Struktur organisasi dinas sosial	71
Gamabar 10 Struktur organisasi kelurahan penengahan raya	74
Gambar 11 Indikator desil.....	82
Gambar 12 Struktur alur kebijakan penanggulangan kemiskinan kota bandar lampung.....	89
Gambar 13 Model Implementasi Kebijakan George.C Edward III	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 susunan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.....	6
Tabel 2 Informan Penelitian	41
Tabel 3 Kondisi Demografi Kota bandar lampung 2024	48
Tabel 4 Jumlah penerima bantuan di kecamatan kedaton	84
Tabel 5 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung	95
Tabel 6 Jumlah dan presentase penduduk miskin kota bandar lampung	99
Tabel 7 Strategi dan Arah kebijakan penanggulanban kemiskinan	103
Tabel 8 Prioritas,sasaran dan identifikasi program pembangunan daerah tahun 2023.....	109

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Babinkamtibmas	: Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Babinsa	: Bintara Pembina Desa (TNI)
BAPPERIDA	: Badan Riset dan Inovasi Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
IT	: Informasi Teknologi
Kasi PEMB & PMK	: Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kasi Pemerintahan	: Kepala Seksi Pemerintahan
Kasi Tantib	: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
KUBE	: Kelompok Usaha Bersama
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
PKPH	: Pendamping Program Keluarga Harapan
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PSM	: Pekerja Sosial Masyarakat
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RS	: Rumah Sakit
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDG'S	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional
TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TKSM	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
IKU	: Indikator Kinerja Utama.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah sebuah kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk di dalamnya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air bersih. Atau dengan kata lain, kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga atau pihak tertentu. Individu yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang tidak dapat mencapai tingkat kesejahteraan minimum yang telah ditetapkan. (Sarbaini dalam Telaumbanua et al., 2023).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan menjadi isu utama dalam agenda pembangunan global. Sebelumnya, upaya pengentasan kemiskinan telah dimuat dalam program Millennium Development Goals (MDGs), yaitu delapan tujuan pembangunan yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 dengan target hingga 2015. Salah satu fokus utamanya adalah pengurangan kemiskinan ekstrem dan kelaparan.

Setelah masa MDGs berakhir, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, melanjutkan komitmen pembangunan berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang dimulai sejak tahun 2015 hingga 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan global, dengan Tujuan Pertama adalah “*No Poverty*” atau penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia. SDGs dirancang lebih luas dan inklusif dibanding MDGs, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai bagian dari anggota PBB, Indonesia berkomitmen

untuk mengatasi persoalan kemiskinan seiring dengan deklarasi SDGs sebagai panduan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam mengoordinasikan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Perpres tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan pendekatan yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berbasis pada data yang akurat, serta melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Lampung menempati urutan ke-13 sebagai provinsi termiskin dari 38 provinsi dengan angka kemiskinan sebesar 11,44% (detikSumbagsel, 2023). Sementara itu, Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi mencatatkan persentase kemiskinan sebesar 7,77%, yang meskipun lebih rendah dari angka provinsi, tetap menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius, termasuk dalam konteks pencapaian target SDGs di tingkat lokal.

Gambar 1. Grafik Presentase Posisi Relatif Penduduk Miskin



Sumber: kemenkopmk sebaran penduduk miskin

Menurut data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3ke) Kemenkopmk data di atas menunjukkan bahwa Presentase tertinggi pada penduduk miskin adalah Kabupaten Lampung Utara dengan nilai angka 17,17% Sedangkan Presentase terendah pada Penduduk miskin adalah Kabupaten Mesuji dengan nilai angka 6,73% Untuk di Kota Bandar Lampung memiliki nilai angka yaitu 7,77% dengan warna Hijau. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih harus memaksimalkan potensi yang dimilikinya seperti dalam bidang industri, perdagangan, dan pariwisata, terlebih Kota Bandar Lampung merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Sumatera dan pusat ekonomi yang strategis antara Pulau Sumatera dan Jawa. Secara teoritis, potensi ini seharusnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, kenyataannya, angka kemiskinan di Bandar Lampung masih relatif tinggi, meskipun kota ini adalah ibu kota provinsi dan memiliki akses ke berbagai peluang ekonomi.

Kota Bandar Lampung memegang peran kunci dalam perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Namun, ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang makmur dan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Walikota sebagai kepala daerah memiliki kewenangan yang strategis untuk perlahan mengatasi permasalahan tersebut, terlebih kemiskinan memperburuk berbagai aspek seperti akses pendidikan, ekonomi, infrastruktur, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja.

Walikota Bandar Lampung menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan peran strategis kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) untuk membentuk sebuah tim yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kota Bandar Lampung. Menyikapi hal tersebut Walikota Bandar Lampung menerbitkan Surat Keputusan Nomor B.119/V.01- HK/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kota

Bandar Lampung tersebut memiliki fungsi diantaranya melakukan pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kota Bandar Lampung Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, dimana menurunkan kemiskinan merupakan salah satu sasarannya melalui salah satu arah kebijakan yaitu meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulan kemiskinan daerah.

Sejumlah aturan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 12, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4967);
3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 1312);
4. Peraturan menteri sosial nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 868);
5. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 29/ptr/m/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 1891);
6. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 32 tahun 2018

tentang standar pelayanan minimal pendidikan (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 1687);

7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 158);
8. Peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 68);
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 1114);
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 1447);
11. Peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi lampung tahun 2019-2024 (lembaran daerah provinsi lampung tahun 2019 nomor 13, tambahan lembaran daerah provinsi lampung nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2021 (lembaran daerah provinsi lampung tahun 2021 nomor 12);
12. Peraturan daerah kota bandar nomor 1 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2016-2021
13. Surat keputusan walikota bandar lampung nomor b.11/v.01-wk/hk/2022 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kota bandar lampung tahun 2022.

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi TKPK di daerah, Walikota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 355/IV.01/HK/2024 tentang “Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024”.

Pembentukan Tim TKPK ini dilakukan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Kebijakan Nasional. Penyusunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bandar Lampung, Penanggung jawab : Wali Kota Bandar Lampung, Ketua: Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Wakil Ketua : Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Wakil Sekretaris : (1). Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (2). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung (3). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung (4). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung Adapun susunan keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bandar Lampung

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Penanggung Jawab	Wali Kota Bandar Lampung
2.	Ketua	Wakil Wali Kota Bandar Lampung
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung
5.	Wakil Sekretaris	1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung 3. Kepala Dinas Kependudukan

- dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
4. Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Asistensi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Kota Bandar Lampung	Koordinato	Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
2.	Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Bandar Lampung	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	Anggota	
7.	Lembaga advokasi Perempuan DAMAR	Anggota	
8.	Save The Children	Anggota	

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Asistensi Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	Koordinator	Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	Anggota	Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung	Anggota	
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	Anggota	
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kelautan Kota Bandar Lampung	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pangan dan Kota Bandar Lampung	Anggota	

Sumber : Surat keputusan walikota bandar lampung

Permasalahan kemiskinan yang kompleks ini membutuhkan berbagai pendekatan dari seluruh aspek terkait. TKPK memastikan agar seluruh kegiatan penanggulangan di daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh OPD dan instansi terkait lainnya sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung dapat tercapai. Laporan ini akan menyajikan secara menyeluruh profil kemiskinan di Kota Bandar Lampung, berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut termasuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Pembentukan TKPKD Kota Bandar Lampung diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi dengan baik, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam tabel dibawah ini menunjukan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya, hal ini menandakan komitmen dan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memerangi kemiskinan.

Gambar 2. Angka Kemiskinan di Kota Bandar Lampung

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	450.014	102,27	10,67
2015	476.055	100,80	10,33
2016	502.968	100,54	10,15
2017	540.679	100,50	9,94
2018	562.277	93,04	9,04
2019	588.177	91,24	8,71
2020	634.743	93,74	8,81
2021	654.576	98,76	9,11
2022	698.598	90,51	8,21
2023	761.790	87,08	7,77

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Sumber: Bandar Lampung dalam angka 2023

Hasil kerja penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilihat dalam waktu jangka pendek. Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan, koordinasi, strategi dan kerja sama yang melibatkan seluruh elemen untuk melakukan penanggulangan kemiskinan secara efektif dan efisien berlandaskan tugas dan wewenang dari pemerintah daerah itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas mengindikasikan bahwa dalam praktiknya TKPKD Kota Bandar Lampung berhasil menurunkan angka jumlah penduduk miskin pada tahun 2014-2023. Tren penurunan grafik dari tahun ke tahun ini tentu dipengaruhi sejumlah kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Dimana kebijakan yang diimplementasikan TKPKD cukup optimal dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti mengangkat judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 (Studi Pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)”**.

1.2. Penelitian Terdahulu

Pada menyusun penelitian ini, penulis menggunakan bahan acuan dan referensi agar dapat mempermudah dalam melihat maupun mengamati fenomena yang ada di instansi. Penelitian terdahulu ini akan sangat membantu penulis saat melakukan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis sebagai bahan acuan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam penelitian ini:

1. Ragil Putri Gendis (2023) dengan judul “Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Memperkuat SGDS di Kabupaten Sleman” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman dalam upaya mengurangi kemiskinan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam hal koordinasi antar instansi. Secara keseluruhan, TKPKD telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun perlu dilakukan perbaikan

berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pembeda adalah Skripsi sebelumnya menekankan pada strategi kolaboratif yang dilakukan oleh tim daerah, menunjukkan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebaliknya pada skripsi peneliti fokus pada evaluasi implementasi kebijakan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks BAPPERIDA Kota Bandar Lampung, dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurangi kemiskinan.

2. Setiani, (2022) dengan judul “Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora Tahun 2021” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi dan hasil percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Blora bersama TKPKD. Hasil dari program percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2016-2020 dikatakan berhasil, sehingga kenaikan yang terjadi pada 2020 bukan disebabkan karena kurangnya upaya dari pemerintah kabupaten dan TKPKD melainkan karena wabah Covid-19. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pembeda adalah Skripsi sebelumnya fokus pada penanggulangan kemiskinan, tetapi dengan pendekatan dan konteks yang berbeda. Skripsi sebelumnya berfokus pada evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora, menekankan pada kecepatan dan efektivitas implementasi program yang ada pada tahun 2021. Sementara itu, skripsi peneliti lebih berorientasi pada kebijakan yang diterapkan oleh BAPPERIDA di Bandar Lampung serta bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam konteks tahun 2023.
3. Alfisyahrin, (2021) dengan judul “Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah harus terus berupaya dalam penyusunan program dan pemantauan pelaksanaan program dimasing- masing dinas maupun badan pemerintahan, agar penanggulangan kemiskinan benar-benar dilaksanakan sesuai program dan jangka waktu yang ditentukan. Dalam penulisan skripsi

ini yang menjadi pembeda adalah Skripsi sebelumnya Skripsi sebelumnya menekankan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd) dalam mengoptimalkan kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Semarang, dengan penekanan pada diskresi kebijakan yang memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaan program-program tersebut. Di sisi lain, skripsi peneliti lebih berfokus pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diusung oleh BAPPERIDA di Kota Bandar Lampung, serta bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap masyarakat pada tahun 2023.

4. Azhari, (2022) dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Pekanbaru” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Dengan meningkatnya angka kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau berupaya bersama stakeholder untuk melakukan program pengentasan kemiskinan melalui strategi pengembangan usaha. Program ini terlaksana tetapi tidak terlaksana dengan baik sesuai tujuan karena masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pembeda adalah Skripsi sebelumnya Skripsi sebelumnya fokus utama kedua penelitian ini terletak pada penanggulangan kemiskinan, tetapi dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda. Skripsi sebelumnya menyoroti strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh TKPK di Pekanbaru untuk mencapai tujuan SDGs, mengindikasikan bahwa pengembangan ekonomi lokal menjadi bagian integral dalam penanganan kemiskinan. Sementara itu, skripsi peneliti lebih menekankan pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh BAPPERIDA di Bandar Lampung dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dalam konteks spesifik tahun 2023, menunjukkan relevansi kebijakan terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.
5. Suharno, (2021) dengan judul “Keadilan Sosial Dalam Pelaksanaan PERDA Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan

Implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah berhasil mencapai ukuran dan tujuannya, namun masih dengan beberapa catatan-catatan. Sumber daya, sisi disposisi, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, dan hubungan organisasi saat ini dinilai sudah cukup baik. Walaupun komunikasi dan hubungan organisasi pada dua tahun pertama ini mengalami masalah. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pembeda adalah Skripsi sebelumnya fokus penelitian kedua skripsi ini sama-sama berada pada

Penanggulangan kemiskinan, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Skripsi Suharno lebih menekankan pada aspek keadilan sosial dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Sleman, dengan fokus pada bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan secara adil dan merata di masyarakat. Sementara itu, skripsi peneliti lebih berorientasi pada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BAPPERIDA di Bandar Lampung, serta menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam konteks tahun 2023, mencerminkan dinamika terbaru dalam penanganan kemiskinan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang termuat dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan sebuah masalah dalam tugas akhir sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi kebijakan penanggulan kemiskinan Kota Bandar Lampung tahun 2023?

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membahas mengenai Implementasi kebijakan penanggulan kemiskinan Kota Bandar Lampung tahun 2023. Penelitian ini dibatasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Ruang Lingkup wilayah penelitian ini adalah Kota Bandar Lampung.

1.5. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai bagi para pembaca adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Bandar Lampung tahun 2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa manfaat secara internal maupun eksternal. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu pemerintahan terkait hubungannya dengan kebijakan publik.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di Bandar Lampung. Dengan menganalisis akar permasalahan dan melibatkan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Konsep Kebijakan Pemerintah

2.1.1. Definisi Kebijakan

Kata dasar dari "kebijakan" adalah "bijak," yang berarti menggunakan akal budi, kecerdasan, dan keterampilan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan merujuk pada sekumpulan konsep dan prinsip yang menjadi dasar serta pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan tugas, kepemimpinan, dan tindakan. Monahan dan Hengst mengemukakan bahwa kebijakan yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris, yaitu *policy* secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yakni “polis” yang memiliki arti kota (Heinz Weihrich and Haroid Koontz, 1993). Kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi untuk mengelola kegiatan mereka demi mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kebijakan biasanya berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau negara untuk menyelesaikan masalah mendesak yang dihadapi masyarakat. Langkah-langkah ini melibatkan berbagai aktivitas, tindakan, sikap, program, dan keputusan. Hal ini dilakukan manakala peraturan hukum konstitusi berkaitan dengan hal tersebut belum diatur.

Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa dalam sebuah kebijakan sekurang- kurangnya wajib memuat empat hal krusial, antara lain peningkatan taraf hidup masyarakat, terjalin keadilan, baik secara hukum maupun sosial, peluang prestasi dan kreasi individual, masyarakat berperan aktif untuk turut membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi, pengembangan secara

kontinuitas terjamin (Noeng Muhadjir 2000). Hal ini dikarenakan sebuah kebijakan merupakan solusi atas problem sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berlandaskan asas keadilan dan kesejahteraan.

Menurut (Desrinelti,et.al 2021). Definisi lain mengatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas tiga hal, antara lain :

1. Input kebijakan. Secara harfiah input berarti masukan, baik itu berupa informasi atau peristiwa yang dapat merangsang atau memberikan stimulasi terhadap bangkitnya suatu tindakan. Dalam hal ini input kebijakan dapat berupa agenda pemerintah atau permasalahan yang sedang terjadi.
2. Proses kebijakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi mengenai proses sebagai suatu runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Artinya setelah terdapat masukan dari khalayak ramai mengenai isu-isu yang tengah berkembang, pemerintah dalam perkembangan selanjutnya akan merumuskan kebijakan tersebut untuk kemudian dapat dilaksanakan.
3. *Output* kebijakan. *Output* merupakan hasil yang dicapai dalam rentang waktu tertentu. Rentang waktu sebuah kebijakan tidaklah bersifat permanen, hal ini tergantung kepada bagaimana kebijakan tersebut dapat menjadi solusi yang efektif terhadap permasalahan yang terjadi. Maka *output* dari sebuah kebijakan adalah kinerja kebijakan dalam menghasilkan tujuan dan menjangkau sasaran seperti yang sebelumnya telah ditentukan.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan merupakan sebuah praktik sosial atau tindakan-tindakan terarah pemerintah, pejabat atau perilaku negara pada umumnya dalam mengambil keputusan sebagai upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah timbul atau berkembangnya suatu permasalahan.

2.1.2. Peraturan Kebijakan

Dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan pengelolaan administrasi negara. Pemerintah telah menuangkan berbagai macam bentuk kebijakan yang terwujud dalam berbagai hal antara lain adalah: garis kebijakan, kebijakan, perumusan pedoman dan berbagai macam petunjuk, surat edaran yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, peraturan menteri, keputusan, dan pengumuman-pengumuman yang diinformasikan (J.H Van Kreveld ,1983). Sebagaimana yang diutarakan oleh Philipus M.Hadjon, secara peraturan kebijakan yang telah diundangkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan “*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*” berarti memvisualisasikan sebuah kebijakan tertulis (Philipus M. Hadjon, et.al,2011). Berdasarkan dari hal tersebut, peraturan dan kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan telah menjadi fungsi sebagai panduan dalam kegiatan operasional kegiatan pemerintahan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bersama.(Purnamawati dan Hijawati.2022).

Terdapat beberapa karakteristik kebijakan menurut (Bagir Manan,1994) antara lain

1. Kebijakan adalah sesuatu hal yang berbentuk aturan yang secara hierarki bukan merupakan bagian dari perundangan.
2. Dikarenakan secara hierarki kedudukan peraturan kebijakan bukan menjadi bagian dari perundangan, maka keberadaannya tidak dapat dapat dibatasi dan tidak dapat diuji seperti rancangan perundangan.
3. Perumusan dalam peraturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah keberadaannya tidak dapat diuji secara hukum dikarenakan keberadaannya tidak memiliki dasar terhadap perundangan yang sebelumnya telah ada.
4. Peraturan kebijakan disusun sesuai yang berkepentingan.
5. Penyusunan peraturan kebijakan lebih diperuntukkan kepada asas yang kemanfaatan yang berlaku di dalamnya sehingga pengujiannya dilakukan dengan asas umum dan larangan

penyelewengan jabatan yang berlaku pada pemerintahan tersebut.

6. Peraturan kebijakan dapat ditemui dalam berbagai macam bentuk surat keputusan, aturan yang telah dipasang, instruksi dan berbagai macam edaran yang peruntukannya ditujukan kepada masyarakat secara luas.

Menurut (Marcus Lukman,1996). peraturan kebijakan bisa diterapkan secara efektif dan efisien sebagai berikut:

1. Sarana pengaturan yang efektif yang menjadi pelengkap dalam mengisi kelemahan perundangan yang diberlakukan.
2. Media yang tepat dan efektif dalam mengisi kekosongan hukum pada sebuah peraturan perundangan-undangan.
3. Sarana pengaturan yang tepat dan efektif bagi sebuah hajat umum yang belum dapat diterima secara layak, akurat serta adil dalam peraturan perundangan- undangan.
4. Media konstitusi yang efektif dalam melengkapi aturan perundangan yang sudah tidak diberlakukan.
5. Sarana pengaturan yang efektif dalam menunjang tugas tata kelola pemerintahan dalam bidang administrasi dan pembangunan yang bertransformasi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Menurut (Indroharto,1980) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peraturan kebijakan antara lain:

1. Peraturan kebijakan dilarang untuk melanggar peraturan dasar yang mengandung kewenangan diskresioner (*discretionary power* atau *freies ermessen*), yaitu kebebasan dari petinggi pemerintah saat pengambilan keputusan dalam situasi serta kondisi tertentu.
2. Peraturan kebijakan haruslah sesuai dengan akal sehat.
3. Peraturan kebijakan perlu dirancang dengan seksama; setiap kebutuhan, kondisi serta alternatif yang ada harus diperhitungkan.
4. Peraturan kebijakan yang diberikan harus mengandung isi yang jelas dan tidak multitafsir sehingga masyarakat mudah memahami.
5. Landasan dalam merumuskan kebijakan tersebut harus memiliki

dasar tujuan yang jelas.

6. Peraturan kebijakan yang dirumuskan harus memenuhi berbagai macam asas hukum seperti hukum materiil yang berlaku. Segala macam hak masyarakat harus diperhatikan dan dihormati dan menganut asas kepentingan umum.

Sementara itu menurut Marcus Lukman dalam (Mohammad Yuhdi, 2013) perlu memperhatikan beberapa hal sebelum menerapkan dan mengaplikasikan peraturan kebijakan yang akan diberlakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Rumusan peraturan kebijakan yang disusun harus sejalan dan selaras dengan perundangan yang berlaku. Kebijakan yang diberikan hendaknya harmonis dan sinkron terhadap perundangan yang telah berlaku. Termasuk di dalamnya adalah tujuan perundangan yang dapat memberikan ruang kebebasan dalam bertindak;
2. Kebijakan yang akan diterapkan harus sesuai dan sejalan dengan asas hukum yang sebelumnya telah diberlakukan. Berbagai macam asas hukum tersebut seperti asas perlakuan yang sama, kewajaran, dan keseimbangan sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara merata dan adil.
3. Kebijakan yang akan diberlakukan dapat menjadi alternatif penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang ada.

2.1.3. Kebijakan Publik

Sebagai suatu konsep, kebijakan publik adalah suatu kebijakan dari pemerintah ataupun entitas tertentu baik itu oleh lembaga maupun badan pemerintahan sebagai sebuah tanggapan atas permasalahan orang banyak (umum) melalui program program atau upaya lainnya. Pendapat tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh (Gerston, L.N ,1992) bahwasannya kebijakan publik merupakan sebuah langkah yang dilaksanakan pihak pemerintah sebagai respon masukan dari masyarakat yang berada di dalamnya untuk menyelesaikan berbagai macam

persoalan-persoalan sosial. Berbagai macam pendapat para ahli telah dikemukakan terkait dengan pengertian kebijakan publik tersebut.

Thomas Dye telah mengemukakan bahwa: “*public policy is whatever the government chooses to do or not*” dalam (Ismail Nawawi 2009)

Pendapat tersebut memiliki arti bahwa kebijakan publik adalah batasan-batasan dalam mengambil keputusan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Lebih lanjut Thomas Dye mengungkapkan bahwa manfaat atas pelaksanaan kebijakan tersebut perlu menjadi pertimbangan yang matang agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian. Walaupun tidak menutup kemungkinan kerugian tersebut terjadi. Maka dari itu pemerintah haruslah bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

W.I. Jenkins mengemukakan konsep dari kebijakan publik adalah keputusan dari pihak yang berwenang berwenang dalam mencapai tujuan yang ditentukan beserta dengan tata cara yang nantinya akan dilakukan dalam (Solichin Abdul Wahab 2014) Sementara itu Carl J Federick telah mengemukakan bahwa kebijakan merupakan perangkat inisiatif yang diselenggarakan dengan prakarsa suatu individu atau kelompok yang membahas mengenai solusi yang akan dilakukan atas hambatan atau kesulitan yang ada di dalamnya (Leo agustino, 2008).

Sehubungan dengan keberadaan peraturan kebijakan, maka akan selalu berkaitan dengan *freies ermessen* atau kebebasan wewenang dari pemerintah. Secara etimologis *freies ermessen* terdiri atas kata *frei*, *vrij* bestuur yang bermakna bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara *ermessen* bermakna menilai, mempertimbangkan, memperkirakan, serta menduga. Maka *freies ermessen* dapat didefinisikan menjadi media yang memberikan keleluasaan atau ruang gerak bagi seseorang, dalam konteks ini pejabat ataupun beberapa badan administrasi negara untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu tanpa harus sepenuhnya terikat pada Undang-Undang. (Marcus Lukman, 1996)

Kebijakan publik adalah sistem hukum, pengaturan, tindakan, dan prioritas pendanaan pada topik-topik tertentu guna menjaga ketertiban dan menanggapi kebutuhan warganya. Kebijakan publik akan memuat mengenai berbagai rencana, program, dan skema topik kebijakan publik yang dianggap dapat membawa dampak bagi kehidupan sosial. Melalui *freies ermessen* badan administrasi negara atau pejabat dapat melakukan tindakan seperti dalam hal membuat dan melaksanakan suatu kebijakan dengan efektif tetapi tetap mengacu pada kebijakan konstitusi, ataupun wewenang yang sah dalam ikut andil pada kegiatan sosial dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum.

2.1.4 Tahapan- tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Sebelum kebijakan publik terbentuk, ada proses yang harus dilalui, yaitu serangkaian kegiatan dalam sistem yang mengikuti langkah-langkah tertentu. Proses ini berlangsung berulang kali dan menghasilkan sesuatu. Dalam kebijakan publik, kita bisa melihatnya tidak hanya dari sudut pandang sistem dengan input, proses, hasil, dan umpan balik, tetapi juga sebagai rangkaian tahapan yang selalu diulang. Menurut (O Charles. Jones, 1984) Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

1. Menentukan Masalah dan Kebutuhan: Langkah pertama dalam penyusunan kebijakan sosial adalah mengumpulkan informasi tentang masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (*unmet needs*).
2. Menganalisis Masalah dan Kebutuhan: Langkah selanjutnya adalah mengolah dan memilah data tentang masalah dan kebutuhan masyarakat, kemudian menganalisisnya untuk disusun dalam laporan yang terorganisir. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa yang menjadi penyebab masalah, apa saja kebutuhan masyarakat, dampak apa yang mungkin terjadi jika masalah tidak diselesaikan dan kebutuhan tidak dipenuhi, serta siapa saja atau kelompok mana yang terkena dampak masalah

tersebut.

3. Menyampaikan Rencana Kebijakan: Berdasarkan hasil analisis, disusunlah rencana kebijakan yang kemudian disampaikan kepada berbagai kelompok masyarakat yang terkait dengan masalah kebijakan sosial untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Rencana ini juga bisa diajukan ke lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui
4. Penyusunan Kebijakan: Setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat, dilakukan diskusi untuk menghasilkan alternatif kebijakan. Alternatif-alternatif ini kemudian dianalisis lagi dan disempurnakan menjadi tujuan kebijakan yang lebih jelas.
5. Pemilihan Model Kebijakan: Pemilihan model kebijakan bertujuan untuk menentukan pendekatan, metode, dan strategi yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kebijakan. Pemilihan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat didasarkan pada prinsip ilmiah yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Menetapkan Indikator Sosial: Untuk mengukur pencapaian tujuan dan keberhasilan model kebijakan secara objektif, diperlukan indikator-indikator sosial sebagai ukuran atau standar untuk rencana tindakan dan hasil yang ingin dicapai.
7. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: Pada tahap ini, rencana kebijakan yang telah disempurnakan disampaikan kembali ke publik. Kemudian, melibatkan berbagai pihak terkait dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi, dan membangun kesepakatan dengan kelompok masyarakat untuk mencapai

konsensus mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan. Adapun siklusnya dapat di gambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini:

Gambar 3. Tahapan Kebijakan Publik

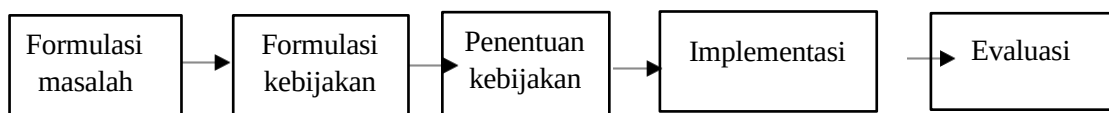


Sumber: william N (2003)

2.1.5. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses penerapan rencana, kebijakan, atau program ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks kebijakan publik atau manajemen, implementasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk merealisasikan keputusan yang telah dibuat, termasuk pengelolaan sumber daya, koordinasi antar pihak yang terlibat, serta pemantauan hasil yang diperoleh. Tujuan dari implementasi adalah memastikan bahwa sasaran dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Implementasi yang baik memerlukan perencanaan yang cermat, komunikasi yang jelas, dan keterlibatan dari semua pihak yang berkepentingan (Hernandez, MHernandez, M. (2022).

Gambar 4. Tahapan Formulasi Kebijakan



Sumber: Diana Herdiana (2019)

Dalam penelitian ini peneliti berencana melakukan kajian bagaimana implementasi kebijakan dengan ukuran implementasi (Langkai 2020) mengatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi

adalah 60%nya, sisanya adalah bagaimana implementasi itu dikendalikan. untuk mewujudkan suatu maksud atau tujuan tertentu melalui kebijakan public, maka pertama-tama kebijakan publik itu harus dirumuskan (*formulation*) lalu dilaksanakan (*implementation*) dan kemudian dievaluasi (*evaluation*) seluruh proses perumusan maupun pelaksanaannya.

Mengacu pada Kamus Webster (dalam Langkai, 2020), implementasi, mengimplementasikan (*implementation, to implement*) berarti “*to provide means for carrying out*” (menyediakan alat bantu atau sarana untuk melaksanakan sesuatu); “*to give practical effect to*” (menimbulkan dampak atau berakibat sesuatu). Itu berarti bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan berupa intervensi atau manipulasi atas hal/aspek tertentu dalam kehidupan bersama sebagaimana tertuang dalam formulasi kebijakan,

Menggunakan atau memanfaatkan sumberdaya baik manusia, finansial, maupun organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, dengan maksud menimbulkan dampak sebagaimana diharapkan. Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dikutip (Agustino 2008) merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan selalu mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
- 3) Adanya hasil kegiatan

Menurut (Agustino, 2020) bahwa dalam implementasi kebijakan, ada tujuan atau sasaran tertentu yang hendak dicapai atau dipenuhi melalui suatu aksi atau kegiatan yang menghasilkan suatu output dan outcomes

tertentu. (Lengkai, 2020) mengatakan bahwa kebijakan diturunkan dalam bentuk program-program, yang kemudian dioperasionalkan sebagai proyek-proyek yang wujudnya adalah kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Program, proyek dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan, hasilnya berupa “produk” yang merupakan *otput* dan *outcomes* dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap menentukan dalam seluruh proses kebijakan publik, terutama menyangkut efektivitas kebijakan itu sendiri; dan pada sisi yang lain, dalam kenyataannya mengimplementasikan kebijakan sederhana. bukanlah Dia sesuatu bukanlah yang sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang sangat *complicated*. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan (Gede .Sutmasa, 2021).

2.2. Pemerintah Daerah

2.2.1. Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang memiliki tujuan utama memenuhi kepentingan rakyat dan mengupayakan tercapainya tujuan negara, seperti pertahanan, keamanan, kesejahteraan, tata tertib, kesehatan, keadilan, dan lain sebagainya. Pemerintah yaitu sebuah lembaga pelaksana pemerintahan suatu negara, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Ditinjau berdasarkan sifatnya, pemerintahan dalam arti luas meliputi kekuasaan menyusun (legislatif), kekuasaan melaksanakan (eksekutif), serta kekuasaan menegakkan (yudikatif). Sementara itu pengertian pemerintah dalam artian sempit berarti mencakup kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, daerah didefinisikan sebagai sebuah wilayah teritorial yang makna, batasan, dan

karakterisasinya yang disesuaikan dengan kewenangan administratif pemerintahan dalam suatu peraturan perundang undangan.(Nia K Pontoh dan Iwan Kustiwan, 2008). Daerah otonom yang kemudian dijuluki daerah merupakan perkumpulan masyarakat hukum yang memiliki batasan teritorial yang memiliki wewenang untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat serta kepentingan pemerintahannya sendiri dengan mengacu pada aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan yang memiliki kebebasan seluas-luasnya namun tetap sesuai dengan sistem serta prinsip NKRI yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah pihak yang melaksanakan otonomi daerah dan disusun sejalan dengan sistem desentralisasi yang bermakna pelimpangan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan asas otonomi sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara etimologi, Otonomi daerah berasal dari Bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri serta *nomos* yang bermakna perundangan. Maka otonomi daerah berarti menyusun peraturan sendiri (*zelfwetgeving*) dan mencakup pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) (Yusnani Hasyimzum 2014) Pasal 1 ayat 6 UU No. 23 Tahun 2014 mengemukakan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut (Rudy, et.al., 2020) Dalam melaksanakan otonomi, daerah wajib mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi bebas, bermakna bahwa suatu daerah diberikan kebebasan untuk mengatur serta mengurus segala urusan

pemerintah disamping urusan pokok pemerintah sebagaimana yang termuat dalam UU No 23 Tahun 2014. Dalam konteks tersebut, Pemda dapat membuat kebijakan yang bertujuan pada peningkatan kemakmuran rakyat dengan cara meningkatkan layanan, pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat.

2. Prinsip otonomi nyata, maknanya yaitu segala bentuk urusan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan wewenang, tugas, serta kewajiban serta dapat terus meningkat sejalan kekhasan serta potensi setiap daerah. Sehingga dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tentu akan berbeda.
3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, maksudnya penyelenggaraan otonomi daerah wajib sejalan dengan maksud dan tujuan peruntukannya, yakni pemberdayaan daerah salah satunya dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat yang menjadi aspek utama dalam pencapaian tujuan nasional.

Pemerintah daerah memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah sebagai suatu wewenang, hak, serta kewajiban daerah dalam konteks mengurus dan mengatur urusannya sendiri sejalan dengan hukum konstitusi di samping kekhasan yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam hal ini, Pemda meliputi gubernur, walikota, atau bupati, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.2.2. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Leiwakabessy, 2020).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP Perangkat daerah) yang

mengamanatkan kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk segera membentuk organisasi perangkat daerah (Doktor et al., 2016). Penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, 10 tahun kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014, dan diubah kembali menjadi PERPU No. 2 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 merupakan perubahan paradigma manajemen pemerintahan birokrasi yang berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas. Penyelenggaraan birokrasi Pemerintah perlu diarahkan kepada prinsip mewujudkan good governance dengan berorientasi kepada 3 (tiga) pendekatan yaitu efisiensi, ekonomi dan pemerataan.

Pada awal 2003, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang lebih lanjut mengatur kriteria, standar susunan dan struktur organisasi perangkat daerah. Di dalam PP tersebut telah ditetapkan mengenai standar jumlah pembentukan dinas dan lembaga teknis daerah serta kriteria bobot pembentukan dinas di daerah. Peraturan ini dalam pelaksanaan awal telah menimbulkan polemik tersendiri dalam pengelolaan kelembagaan daerah mengingat belum jelasnya argumentasi dan dasar secara akademis mengenai penentuan standar jumlah 10 dinas bagi tingkatan provinsi dan 14 dinas bagi kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, maka peraturan ini harus disosialisasikan ke seluruh daerah sehingga mampu menjadi pedoman dalam membentuk perangkat daerah yang dibutuhkan sesuai dengan potensi dan kompetensinya.

2.3. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-

sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri berdasarkan temuan dari berbagai kajian, indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari kegiatan sensus dan survei. Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.(Fahm, 2021)

2.3.1. Bentuk bentuk kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan relative

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh

lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif menurut Supriatna terdapat lima ciri-ciri penduduk miskin, antara lain:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri
- b. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri
- c. Tingkat Pendidikan pada umumnya rendah
- d. Banyak diantara mereka tidak memiliki fasilitas.
- e. Diantara mereka berusia relative muda dan tidak memiliki keterampilan atau Pendidikan yang memadai

2.3.2. Faktor penyebab kemiskinan

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2005).

Menurut (Kartasasmita, 1996), konsep kemiskinan berdasarkan pola

waktu, yaitu:

- a. Kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun Daerah seperti itu pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi (*persistent poverty*)
- b. Kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan (*cyclical poverty*)
- c. Kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan (*seasonal poverty*)
- d. Kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (*accidental poverty*).

Menurut (Munkner dan Walter, 2001), kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor dan dimensi yang berbeda, yang tergantung pada lokasi dan struktur keluarga orang miskin. Misalnya, apakah mereka tinggal di desa atau kota, serta apakah mereka hidup dalam keluarga besar, keluarga inti, atau sendirian. Beberapa pandangan tentang penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Jika kemiskinan disebabkan oleh rendahnya sumber daya dan kondisi perdagangan yang tidak menguntungkan, maka meningkatkan produktivitas, akses pasar, dan harga yang adil untuk produk yang dihasilkan oleh orang miskin bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan.
2. Jika kemiskinan disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang buruk, maka pemanfaatan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan praktik yang ramah lingkungan bisa menjadi jalan keluar.
3. Jika kemiskinan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta akses ke informasi, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan, maka pengembangan sumber daya manusia bisa menjadi cara untuk mengurangi kemiskinan.

Menurut (Suharto 2005), penyebab kemiskinan bisa dilihat dari beberapa faktor berikut:

1. Faktor Individual: Kemiskinan yang berkaitan dengan masalah pribadi, seperti kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin sering kali disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan mereka sendiri dalam menghadapi kehidupan.
2. Faktor Sosial: Kondisi lingkungan sosial yang membuat seseorang terjebak dalam kemiskinan. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, atau etnis yang dapat menyebabkan seseorang menjadi miskin. Faktor ini juga mencakup kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang seringkali membuat kemiskinan terus berlanjut antar generasi.
3. Faktor Kultural: Budaya atau kebiasaan hidup yang dapat menyebabkan kemiskinan. Ini sering disebut sebagai "budaya kemiskinan", di mana orang miskin memiliki pola pikir dan kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya, sikap negatif seperti malas, pasrah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, atau kurang menghargai kerja keras, yang sering ditemukan pada orang miskin. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menunjukkan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur tersendiri.
4. Faktor Struktural: Sistem atau struktur yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak mudah dijangkau, yang menyebabkan kemiskinan. Contohnya, sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia yang lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing, sementara petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjebak dalam pajak dan iklim investasi yang tidak menguntungkan bagi mereka.

2.4. Kerangka Pikir

Kemiskinan adalah masalah yang rumit dan melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan terorganisir, mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Kemiskinan menjadi tantangan utama dalam pembangunan Kota Bandar Lampung, terutama dalam upaya mencapai kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sangatlah sentral guna menyeimbangkan permasalahan ini, sehingga terciptalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung, hal ini diharapkan dapat menangani masalah kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, Penulis akan melakukan penelitian mengenai IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 (Studi Pada BAPPERIDA Kota Bandar Lampung), dengan menggunakan teori implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan teori George Edwards III: untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan komprehensif yang memperhatikan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi
 - a. Bagaimana informasi tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan dikomunikasikan kepada para pelaksana di Bapperida
 - b. Kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan
 - c. Saluran komunikasi yang digunakan dalam proses implementasi
2. Sumber Daya
 - a. Ketersediaan sumber daya manusia di Bapperida kemampuan dan Kompetensi SDM
 - b. Sumber daya keuangan untuk program pengentasan kemiskinan
 - c. Sarana dan prasarana pendukung terlaksananya kebijakan

3. Disposisi

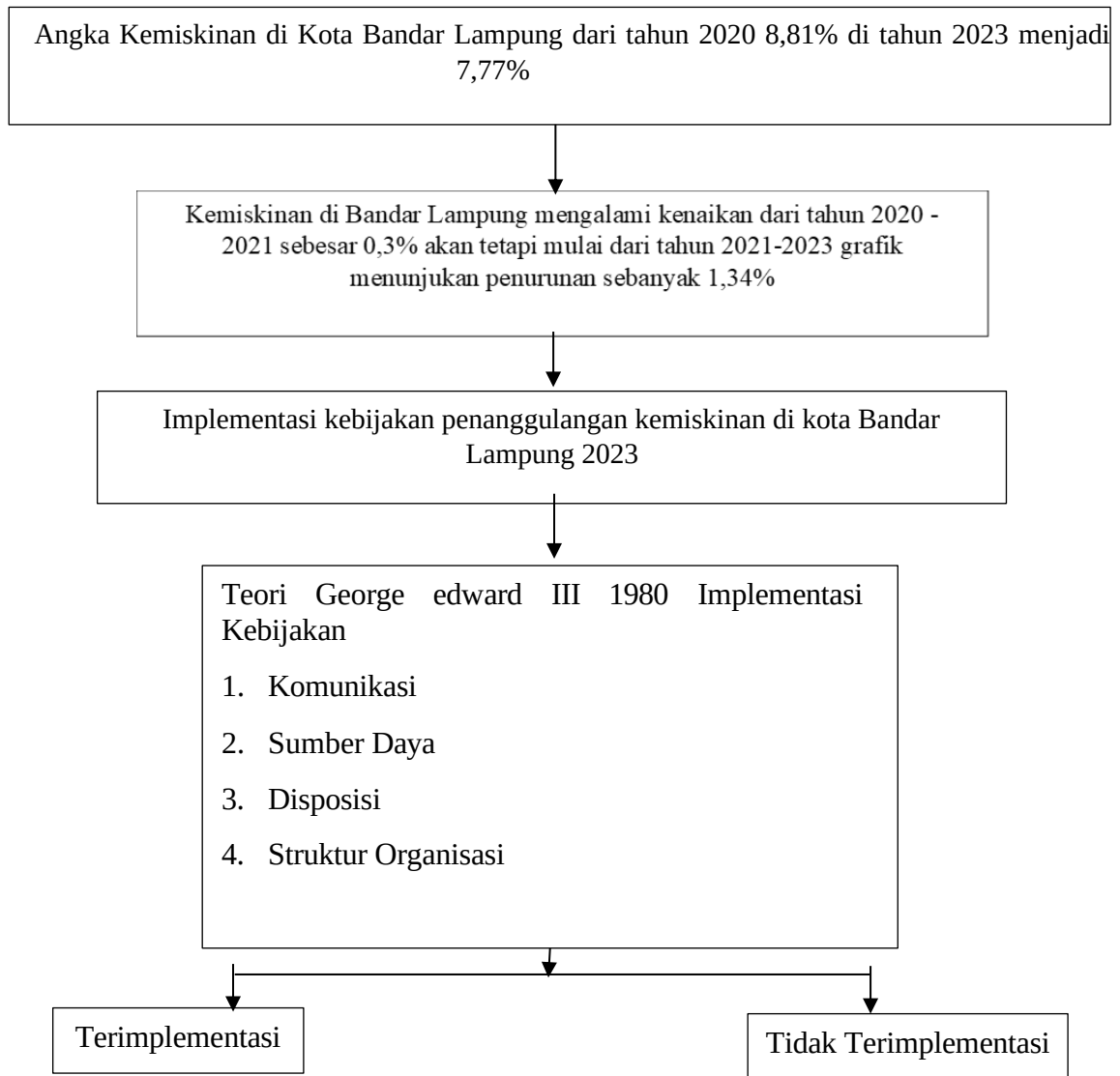
- a. Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan
- b. Respon dan motivasi pegawai Bapperida terhadap program penanggulangan kemiskinan
- c. Pemahaman dan interpretasi pelaksana terhadap tujuan kebijakan

4. Struktur Birokrasi

- a. Mekanisme dan prosedur kerja Bapperida
- b. Pembagian tugas dan tanggung jawab
- c. Koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan

Standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan Berdasarkan tinjauan teori penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut ini peneliti gambarkan model kerangka pikir pengaruh antara variabel penelitian dan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang tersaji pada gambar berikut

Gambar 5. kerangka pikir



Sumber: (Diolah oleh peneliti, 2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2023” menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Menurut Neuman dalam (Rohidin 2010) bahwa “*descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, social setting, or relationship*”. Riset deskriptif adalah riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakteristik atau fungsi dari sesuatu hal. Menurut (Moleong 2007) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian akan dilakukan dimana peneliti akan mendapatkan informasi yang dapat di manfaatkan sebagai bahan untuk memperdalam atau memperjelas masalah penelitian serta hal hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah titik pusat, menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian. hal ini dikarenakan keterbatasan maka peneliti tidak melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu. Penentuan fokus akan berdasarkan hasil studi pendahuluan,

referensi, pengalaman, atau hal hal yang di sarankan oleh ahli.(Hardani,et.al,2020).

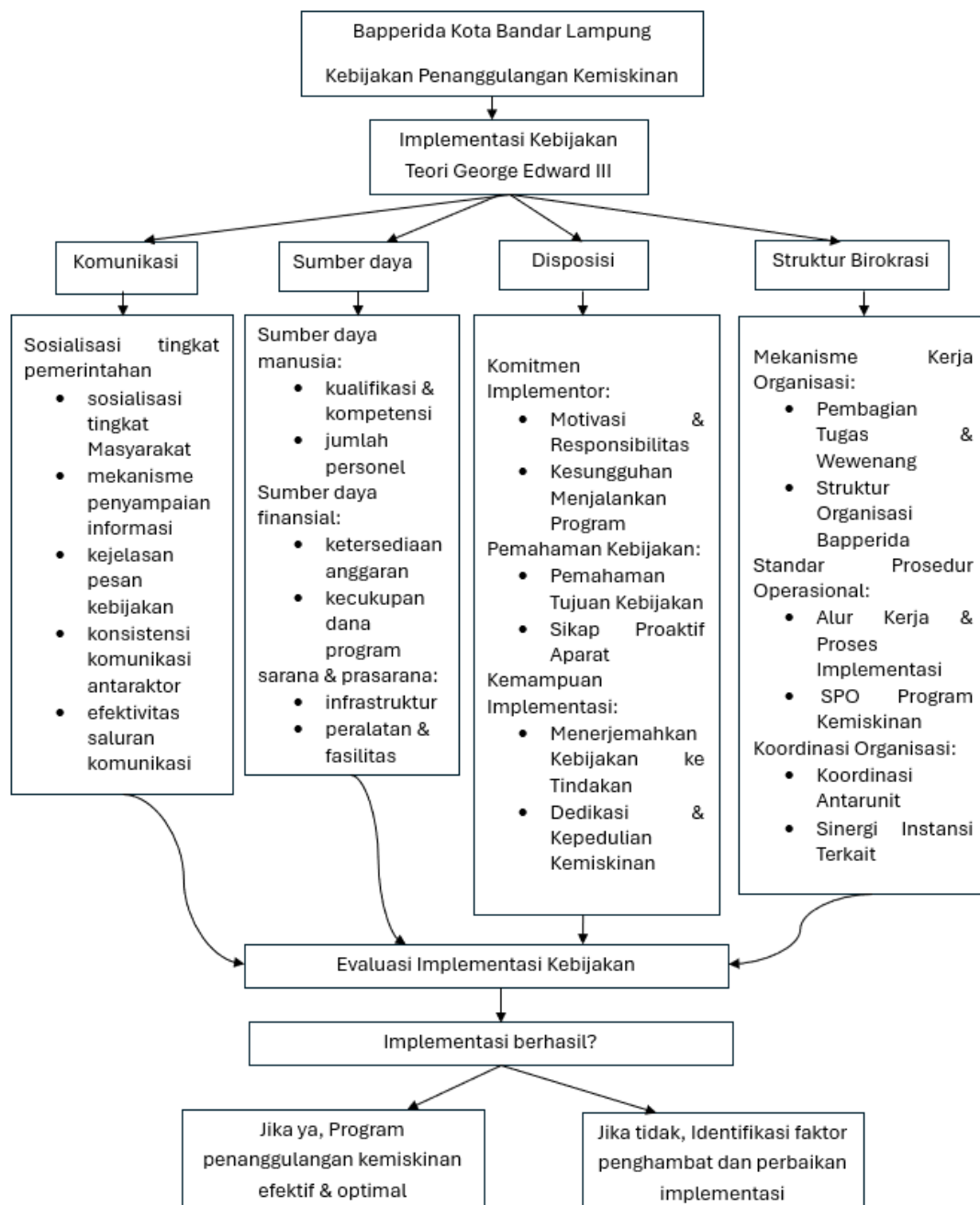
Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu Penelitian. Dengan adanya fokus yang jelas, peneliti dapat lebih terarah dalam memahami permasalahan yang menjadi inti dari tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif masalah bertumpu pada sesuatu fokus.

Terdapat dua maksud tertentu dalam penetapan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong dalam Kusumastuti, 2019). Fokus penelitian implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan menggunakan Teori George Edward III memerlukan penjabaran yang mendalam dan sistematis untuk menghasilkan analisis komprehensif, yaitu:

1. Fokus pada komunikasi kebijakan merupakan tahap fundamental dalam memahami proses penyampaian informasi. Penelitian akan mendalami bagaimana informasi kebijakan disebarluaskan oleh Bapperida Kota Bandar Lampung, mulai dari sosialisasi di tingkat pemerintahan hingga level masyarakat. Hal ini mencakup mekanisme penyampaian informasi, kejelasan pesan kebijakan, konsistensi komunikasi antaraktor, serta efektivitas saluran komunikasi yang digunakan. Tujuannya adalah mengidentifikasi apakah komunikasi yang dilakukan telah mampu menjembatani pemahaman seluruh pihak terkait dalam program penanggulangan kemiskinan.
2. Aspek sumber daya menjadi fokus penting yang akan dianalisis secara mendalam. Penelitian akan mengkaji kapasitas sumber daya manusia yang terlibat, mulai dari tingkat kualifikasi, kompetensi, hingga jumlah personel yang tersedia.

3. Selain itu, akan dievaluasi secara komprehensif ketersediaan anggaran, apakah sudah mencukupi untuk menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan. Sarana dan prasarana pendukung juga menjadi perhatian utama, termasuk infrastruktur, peralatan, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.
4. Berkaitan dengan disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Penelitian akan menyelidiki komitmen para implementor, meliputi motivasi, responsibilitas, dan kesungguhan dalam menjalankan program. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap tujuan kebijakan, sikap proaktif aparat, serta kemampuan mereka dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret. Analisis akan melihat sejauh mana pelaksana memiliki dedikasi dan kepedulian terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Struktur birokrasi menjadi fokus penelitian yang kritis. Penelitian akan menganalisis mekanisme kerja organisasi Bapperida Kota Bandar Lampung, termasuk pembagian tugas dan wewenang yang jelas dan tepat. Standar prosedur operasional (SPO) akan dikaji untuk memahami alur kerja dan proses implementasi kebijakan. Koordinasi antarunit dan instansi terkait menjadi perhatian penting untuk menilai efektivitas dan sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Gambar 6. Alur Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan oleh BAPPERIDA Kota Bandar Lampung Berdasarkan Teori George Edward III"



Sumber: (Diolah oleh peneliti 2025)

Dengan keempat fokus penelitian ini, diharapkan akan dihasilkan gambaran komprehensif dan mendalam tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Analisis yang mendalam ini tidak hanya sekadar mendeskripsikan kondisi, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang. Pendekatan sistematis ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Penelitian ini fokus pada proses Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. Analisis ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan tersebut, termasuk data tentang kemiskinan, strategi yang diterapkan, koordinasi antar lembaga, serta efektivitas program yang dirancang untuk mengurangi angka kemiskinan di tingkat Kota. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memahami bagaimana kebijakan disusun, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data primer dan data skunder merupakan data yang peneliti kumpulkan guna menunjang hasil penelitian. Adapun definisi dari data data tersebut antara lain:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial, serta anggota tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan, seperti laporan tahunan BAPPERIDA, data statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, serta kebijakan dan regulasi pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang mendukung analisis penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan (*expert*) merupakan orang dalam di lokasi penelitian, yang sukarela memberikan informasi yang berharga tentang situasi dan kondisi. Nantinya dalam penelitian ini informan tidak hanya menjawab pertanyaan – pertanyaan secara pasif tapi secara aktif berinteraksi dengan peneliti seperti yang peneliti ciptakan.

Tabel 3. Informan penelitian

No	Nama lembaga	Jabatan / Bidang
1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia
2	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung	Staff (BAPPERIDA)
3	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Sekertaris Dinas Sosial	Sekertari
4	Kelurahan Penengahan Raya	Lurah
5	Warga Penerima Bantuan	Warga Kelurahan Penengahan Raya

(Diolah oleh peneliti, 2024)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian, atau dapat didefinisikan sebagai langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019) Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara menurut definisi Esterberg, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu Interview adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara ntuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian (Dawis et al., 2023). Wawancara di lakukan untuk mengambil data dan informasi mengenai program pada Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandar Lampung Peneliti akan menggunakan panduan wawancara dalam melakukan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan dokumen lainnya yang berisi data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Dawis et al., 2023). Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal yang digunakan dalam penyusunan proposal terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan di

Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. Jenis dokumen yang digunakan meliputi:

- a. Laporan Kebijakan Pemerintah: Dokumen resmi dari pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk peraturan daerah.
- b. Penelitian Sebelumnya: Studi sebelumnya yang relevan dan dapat digunakan untuk memperkuat teori dan analisis dalam penelitian ini.
- c. Data Statistik: Informasi mengenai tingkat kemiskinan dan program sosial yang dipublikasikan oleh BPS atau Dinas Sosial.
- d. Foto dan Hasil Wawancara: Dokumentasi berupa foto dan wawancara yang memberikan bukti langsung tentang pelaksanaan kebijakan.

Dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk membangun landasan teoretis yang kuat dan memberikan wawasan tambahan dalam menganalisis kebijakan yang diterapkan. Referensi dari penelitian sebelumnya juga akan dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai dukungan terhadap argumen yang diajukan.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti (Dawis et al., 2023). Dalam penelitian ini peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti. Setelah itu peneliti akan menggambarkan masalah yang terjadi yang kemudian dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu (Sahir, 2022).

Tujuan menggunakan observasi dalam penelitian tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung tahun 2023 adalah untuk:

- a. Melihat Pelaksanaan Kebijakan: Mengamati langsung bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dijalankan di lapangan.

- b. Menilai Keberhasilan Program: Melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengurangi kemiskinan.
- c. Mengidentifikasi Masalah: Menemukan masalah atau hambatan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Melihat Kerjasama Antar Pihak: Mengamati bagaimana pemerintah, organisasi, dan masyarakat bekerja sama dalam program tersebut. Observasi membantu mendapatkan informasi yang lebih jelas dan nyata tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah serangkaian kegiatan pengumpulan data telah dilakukan, data yang telah terkumpul kemudian di olah sedemikian rupa sehingga akan diperoleh informasi yang runtut dan sistematis. Tahap-tahap pengolahan data antara lain sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah lengkap atau belum serta melihat apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti atau tidak
2. Klasifikasi data, yaitu kegiatan mengelompokkan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian dianalisis lebih lanjut
3. Editing, yaitu kegiatan yang memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian (relevansi) terhadap permasalahan yang sedang diteliti, selain itu data yang diperoleh haruslah terkini (*up to date*), dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sistematika data, yaitu kegiatan dalam mengumpulkan semua data yang diperoleh dan disusun sesuai dengan urutannya

3.8 Teknik Validasi Data

Validasi data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan, diproses, atau digunakan dalam penelitian bersifat akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Tujuan dari validasi data adalah agar data yang diperoleh memenuhi

standar kualitas yang diperlukan untuk mendukung analisis atau pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks penelitian, validasi berperan penting untuk menjamin bahwa data benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti serta bebas dari kesalahan atau bias yang dapat memengaruhi hasil akhir penelitian.

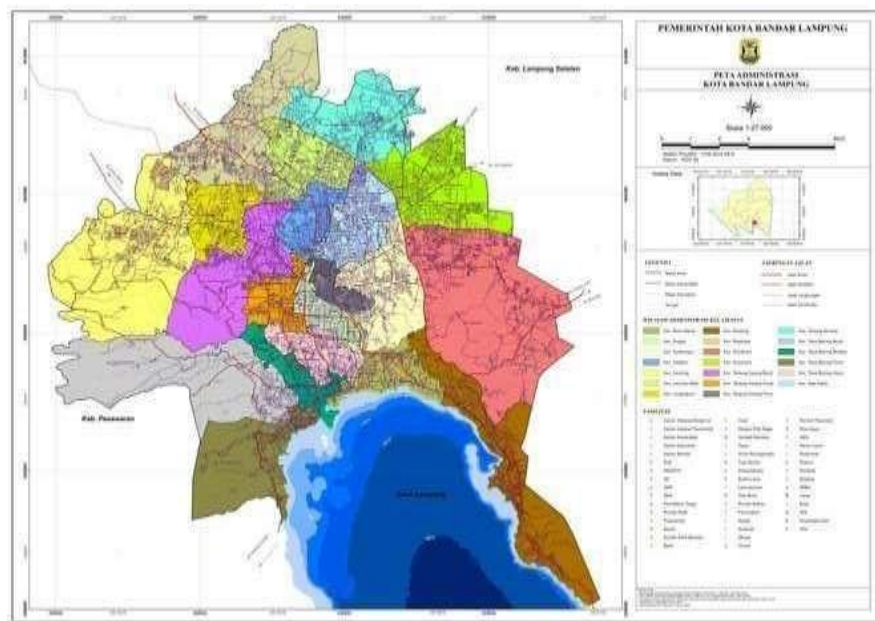
Dalam penelitian ini, teknik validasi data dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri. Menurut Moleong (2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Salah satu bentuk triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumen atau sumber lain yang relevan.

Patton (2002) juga menyatakan bahwa triangulasi memperkuat validitas dengan cara menggabungkan berbagai metode atau sumber informasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian, penerapan triangulasi dalam penelitian ini bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan, meminimalkan bias sub, serta memperkuat kepercayaan terhadap hasil penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Gambar 7 Peta Kota Bandar Lampung



Sumber: Badan Pusat Statistika, Bandar Lampung dalam Angka 2024

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung dan merupakan kota terbesar di provinsi tersebut. Secara geografis, kota ini terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, tepatnya pada koordinat 5°20' hingga 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' hingga 105°37' Bujur Timur, menjadikannya sebagai gerbang utama menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa. Kota Bandar Lampung memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan, perekonomian dan pariwisata bagi masyarakat Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sekitar 197,22 km² yang dibagi menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administrasi Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten

Lampung Selatan;

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan tinjauan topografi, Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian antara 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut, yang mencakup berbagai jenis wilayah yaitu sebagai berikut.

1. Daerah pantai, yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang;
2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara;
3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau;
4. Perbukitan Batu Serampok di bagian Timur Selatan; dan
5. Teluk Lampung dan pulau - pulau kecil bagian selatan.

Terdapat sejumlah sungai yang mengalir di wilayah Kota Bandar Lampung, seperti Way Halim, Way Balau, Way Awi, dan Way Simpur yang terletak di wilayah Tanjung Karang. Sementara itu, sungai Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, dan Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk Betung. Sungai- sungai ini memiliki daerah hulu yang terletak di bagian barat dan hilir yang mengalir di bagian selatan menuju kawasan pantai. Secara umum, wilayah kota terbagi dalam tiga jenis kontur tanah yaitu sekitar 60 persen wilayahnya terdiri dari daerah datar hingga landai, 35 persen lainnya landai hingga miring dan hanya sekitar 4 persen yang berupa daerah sangat miring hingga curam.

Sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung juga merupakan kawasan perbukitan. Beberapa bukit dan gunung yang terkenal di kota ini antara lain Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, dan banyak lagi. Bukit-bukit lain yang tersebar di berbagai lokasi kota juga turut memperkaya topografi Kota Bandar Lampung, termasuk Bukit Serampok, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, dan gugusan Bukit Hatta. Semua unsur alam ini memberikan

keberagaman dan keindahan alam yang memengaruhi kehidupan serta tata ruang kota ini.

Tabel 3 Kondisi Demografi Kota Bandar Lampung 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Area (km ²)	Kepadatan Penduduk (km ²)
Teluk Betung Barat	38.527	18,26	2.110
Teluk Betung Timur	49.926	10,39	4.805
Teluk Betung Selatan	39.359	3,49	11.278
Bumi Waras	58.169	4,52	12.869
Panjang	74.858	13,64	5.488
Tanjung Karang Timur	38.542	2,07	18.619
Kedamaian	53.457	8,34	6.410
Teluk Betung Utara	50.587	4,38	11.550
Tanjung Karang Pusat	50.326	3,50	14.379
Enggal	24.752	2,78	9.263
Tanjung Karang Barat	63.194	11,54	5.476
Kemiling	86.300	21,33	4.046
Langkapura	43.372	5,30	8.183
Kedaton	52.388	3,77	13.896
Rajabasa	55.958	12,93	4.328
Tanjung Senang	62.402	9,24	6.753
Labuhan Ratu	48.208	6,10	7.903
Sukarame	67.138	10,92	6.148

Sukabumi	73.178	25,04	2.922
Way Halim	68.468	6,25	10.955
Total	1.100.109	183,77	5.986

Sumber : Badan Pusat Statistika, Bandar Lampung dalam Angka 2024

Jumlah penduduk yang terus berkembang di Kota Bandar Lampung berpengaruh pada berbagai masalah sosial dan ekonomi, salah satunya kemiskinan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan industri, kemiskinan di wilayah perkotaan semakin menjadi masalah besar. Semakin banyaknya penduduk yang tinggal di kota juga meningkatkan jumlah orang yang hidup dalam kondisi miskin.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang fokus pada pengurangan kemiskinan. Kebijakan ini harus bisa memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dengan bijak dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) secara maksimal. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan akses yang lebih baik pada pendidikan, kesehatan, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Selain itu, dengan memperkuat ekonomi lokal dan membangun infrastruktur yang merata, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung dapat meningkat, dan kemiskinan bisa berkurang.

4.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung. Terdapat Visi, misi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut.

Visi: **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas- batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT: Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada Masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

NYAMAN : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

UNGGUL : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya

terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

BERDAYA SAING : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN: Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
- c. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- e. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
- f. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
- g. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

4.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 64 Tahun 2021, tugas Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung adalah membantu perencanaan pembangunan daerah dan melakukan penelitian serta pengembangan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggaraan fungsi koordinasi perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Wali Kota. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
- c. Penyelenggaraan analisis data dan informasi untuk perencanaan

- pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - h. Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan meliputi bidang perencanaan makro dan evaluasi, perencanaan pemerintahan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, dan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan serta penelitian dan pengembangan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - j. Menyelenggarakan perumusan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - k. Menyelenggarakan monitoring, pembinaan, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 - l. Menyelenggarakan perumusan analisis data dan pembinaan pelaporan terhadap laporan capaian kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi Pemerintah Provinsi dan Pusat, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;

- n. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, bidang perencanaan makro dan evaluasi, bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan perekonomian, bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- o. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- p. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan LKPJ Tahunan Walikota;
- q. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, PK, LAKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN lingkup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- r. Menyelenggarakan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Daerah Kota, meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- s. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan komunikasi dan informasi publik;
- t. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan lingkup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- u. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- v. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran/ pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- w. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
- x. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Walikota

2. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan

pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. Penyelenggaraan penyusunan program Badan, pengadministrasian keuangan dan aset, serta umum dan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang bidang;
- e. Menyelenggarakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perlengkapan, keuangan, kehumasan, pengelolaan keprotokolan serta kearsipan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, kepangkatan, cuti, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- l. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, DIP, PK, LKIP, LKPI, LPPD, LHKPN dan LHKASN lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- n. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- o. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- p. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dibidang perencanaan pembangunan;
- s. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran/pertimbangan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
- t. Menyelenggarakan pengendalian tugas dan fungsi Sekretariat;
- u. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- v. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian kebijakan, monitoring dan evaluasi, meliputi perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan.
- c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi dan Pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- f. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, pembangun dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan

p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia meliputi urusan pemerintahan bidang pembanguna, kebudayaan, pembangun, sosial, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan pembangun dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan, kepegawaian, pembangunan dan pelatihan, pembangunan dewan dan pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional;

- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan pembang kerja sama antar Daerah;
- j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. **Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terkait perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal, keuangan, pengelolaan pajak, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah, pembangunan, perdagangan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional;

- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan 60embang kerja sama antar Daerah;
- j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terkait perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, kebencanaan, komunikasi dan informatika serta kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan 60embang kerja sama antar Daerah;

- j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. **Bidang Riset dan Inovasi Daerah**

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan pemerintahan bidang urusan penelitian dan pengembangan dalam pengoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta pengembangan teknologi dan inovasi.

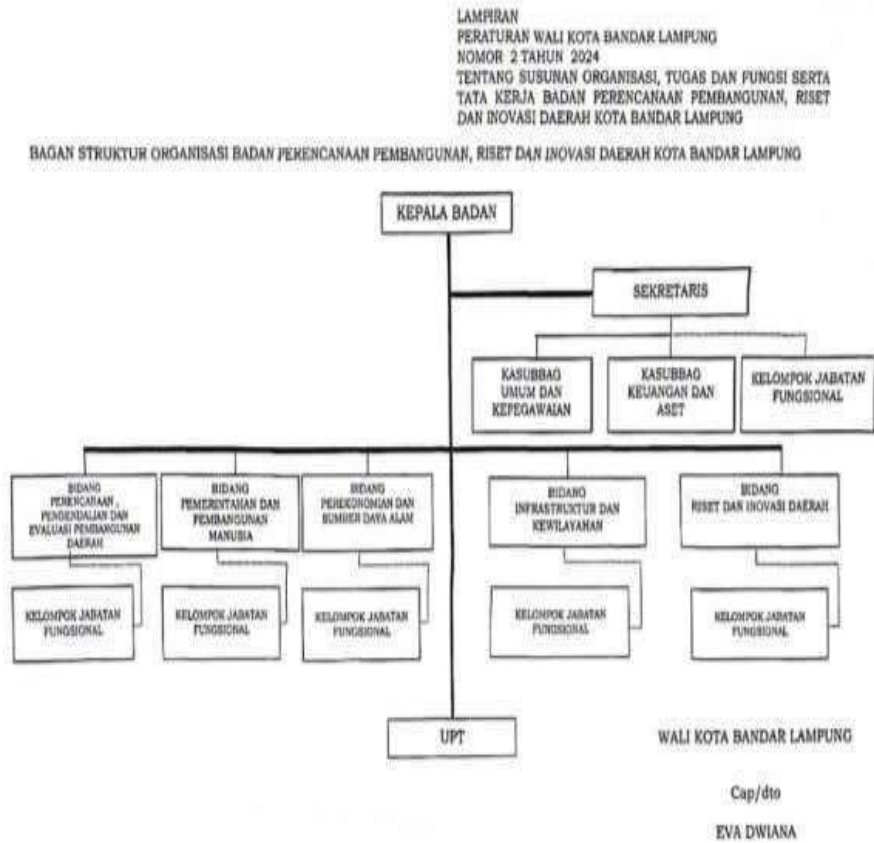
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di ekonomi dan sumber daya alam;
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan penerapan dibidang teknologi dan inovasi;
- e. Menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengembangan dan pengkajian peraturan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
- g. Melaksanakan pengkajian kebijakan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;

- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
- i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
- j. Mengelola data penelitian pengembangan dan peraturan, serta melaksanakan pengkajian peraturan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta teknologi dan inovasi;
- k. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4.2.2 Struktur Organisasi

Gambar 8 Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi daerah



(Sumber BAPPERIDA Kota Bandar Lampung)

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar

Lampung terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah : Kelompok Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

Keberadaan struktur organisasi yang kompleks dan fungsional di Bapperida menunjukkan bahwa instansi ini memiliki kapasitas perencanaan yang sistematis dan terintegrasi, termasuk dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini memiliki relevansi langsung terhadap penelitian ini, mengingat Bapperida berperan sebagai aktor penting dalam proses komunikasi dan koordinasi antarlembaga sebagaimana ditekankan dalam teori implementasi kebijakan George Edward III. Variabel *komunikasi dan struktur birokrasi* menjadi aspek yang dapat diamati dari peran Bapperida dalam menetapkan arah kebijakan dan pengalokasian sumber daya pembangunan sosial.

4.3 Gambaran Umum Dinas Sosial

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, serta Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 Tanggal 31 Desember

2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka dalam rangka menindaklanjuti kebijakan tersebut, perlu dilakukan penataan kembali terhadap nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.

Terdapat tugas dan fungsi Dinas Sosial Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut.

4.3.1 Tugas dan Fungsi

1. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas lingkupnya;
 - d. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Tugas dan Fungsi Dinas Sosail antara lain:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial sesuai denganketentuan perundang-undangan. Peraturan Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, administrasi umum, Pemeliharaan penyediaan barang jasa Pemerintahan Daerah. pengadaan milik penunjang dan Daerah, urusan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretaris di

bantu oleh

- f. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- g. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan pada subbagian umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan rapat-rapat dinas;
- c. Melakukan kepegawaian administrasi kegiatan kebutuhan, pengelolaan dan tata sistem urusan pelaporan kepegawaian yang meliputi penyiapan mutasi, bahan disiplin, rencana kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun;
- d. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi dan pemusnahan arsip;
- e. Menyusun laporan analisis bahan kerja pegawai dan analisis jabatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pemberdayaan sosial meliputi: pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan social, pendayagunaan sumber dana, serta

kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial meliputi, pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial, pendayagunaan sumber dana serta kepahlawanan, keperintisan kejuangan; dan
- b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan kebijaksanaan di bidang pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial, pendayagunaan sumber dana serta kepahlawanan, keperintisan kejuangan; dan
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar lembaga atau instansi terkait;
- d. pelayanan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial, sumber pendayagunaan dana serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- e. penyelenggaraan pelatihan di bidang pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan sosial, sumber pendayagunaan dana serta kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial

serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
- b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijakan dibidang, rehabilitasi sosial pelayanan meliputi dan pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
- d. Penyelenggaraan pelatihan sosial dibidang pelayanan sosial anak pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Bidang ini memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang bantuan dan jaminan sosial, yang meliputi bantuan sosial bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial, bantuan untuk korban tindak kekerasan, bantuan sosial bagi fakir miskin, serta penyelenggaraan jaminan sosial. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial juga memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
- b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan dibidang bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial; \
- c. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan koordinasi kebijakan dibidang bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan tersebut, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Kesejahteraan Sosial

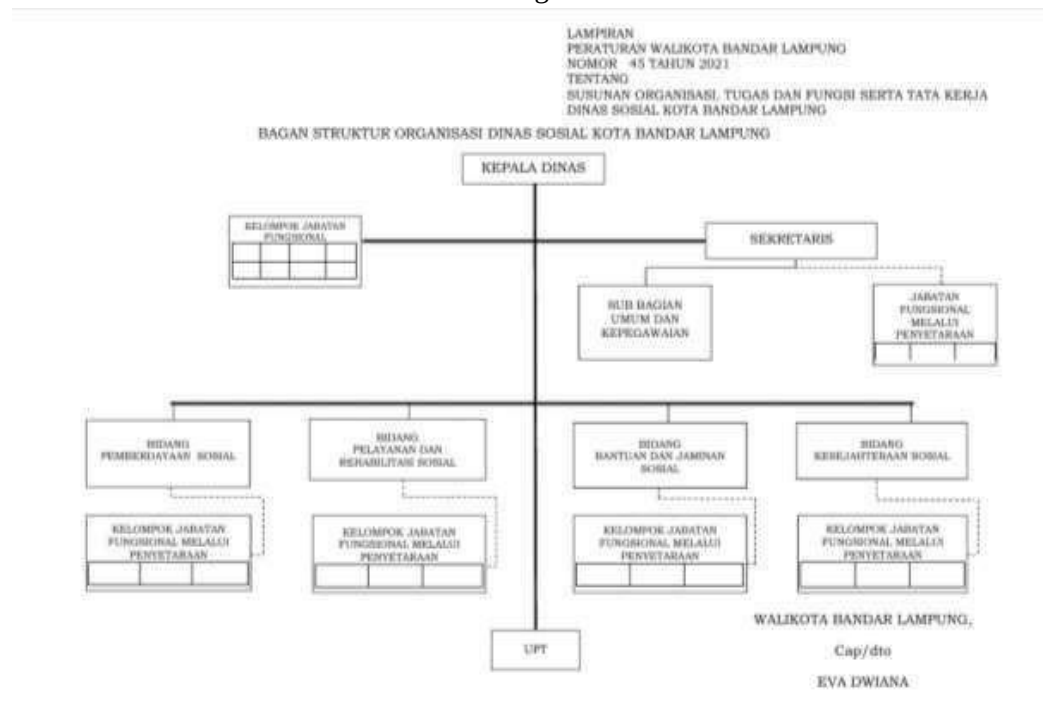
Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kesejahteraan permakaman, data dan informasi sosial, serta kesejahteraan sosial keagamaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Kesejahteraan Sosial juga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang permakaman, data dan

- informasi serta keagamaan;
- Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan bidang pemakaman, data dan informasi serta keagamaan;
 - Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pemakaman, Data dan Informasi serta Keagamaan;
 - Pelaksanaan monitoring, pelaporan; dan evaluasi dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kesejahteraan Sosial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan tersebut, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4.3.2 Struktur Organisasi

Gambar 9. struktur organisasi dinas sosial



(Sumber Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
3. Bidang Pemberdayaan sosial : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
5. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
6. Bidang Kesejahteraan Sosial : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

Dinas Sosial sebagai instansi teknis pelaksana program kesejahteraan sosial di Kota Bandar Lampung memiliki struktur organisasi yang langsung menangani berbagai aspek penanggulangan kemiskinan, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan fokus penelitian ini, di mana implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia, anggaran, dan sikap (disposisi) pelaksana di lapangan, sebagaimana dinyatakan oleh George Edward III. Efektivitas peran Dinas Sosial akan dianalisis untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan dari pusat hingga ke masyarakat penerima manfaat.

4.4 Gambaran Umum Kelurahan penengahan raya

Kelurahan Penengahan Raya Terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 12 Tahun 2012 dimana Kelurahan Penengahan Raya terbentuk dari pemekaran wilayah Kelurahan Penengahan yang sebelumnya merupakan dari bagian Kecamatan Tanjung Karang Pusat sekarang menjadi bagian dari Kecamatan Kedaton. Kelurahan Penengahan Raya memiliki batas wilayah :Sebelah Utara : Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Sukamenanti Sebelah Barat : Kelurahan Gedong Air dan

Kelurahan Sukajawa Sebelah Selatan : Kelurahan Pasir Gintung Sebelah Timur : Kelurahan Jagabaya II.

Alasan peneliti memilih Kelurahan Penengahan Raya sebagai lokasi penelitian karena dahulu terdapat perkampungan tua yang padat penduduk dalam yang masih masuk ke dalam keurahan tanjung karang pusat dan terdapat permasalahan yang cukup kompleks baik permasalahan dari segi kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi, Dimana apabila seseorang atau keluarga ingin keluar dari zona kemiskinan tersebut di butuhkan upaya dari pemerintah dan segenap lapisan masyarakat. Selain itu dalam keurahan ini terdapat sebuah fenomena seperti dalam satu rumah memiliki tiga kartu keluarga atau lebih. Fenomena banyaknya kartu keluarga dalam satu rumah mencerminkan kondisi keterbatasan ekonomi dan tempat tinggal. Ini bisa menandakan antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya ketergantungan ekonomi antar keluarga dalam satu atap.
- b. Keterbatasan kepemilikan rumah layak huni
- c. Kemiskinan struktural, di mana generasi berikutnya tetap terjebak dalam siklus ketidakmampuan finansial.

Penanggulangan kemiskinan secara nyata di tingkat lokal salah satu alasannya karena sistem komunikasi kebijakan di keurahan ini berjalan secara terstruktur melalui koordinasi antara pemerintah kota, Dinas Sosial, TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta PSM (Pendamping Sosial Masyarakat). Melalui struktur tersebut, informasi mengenai program bantuan dapat disampaikan secara berjenjang dari pemerintah hingga ke masyarakat dengan tepat sasaran.

Proses pendataan dan validasi penerima bantuan dilakukan secara menyeluruh dan berlapis, melibatkan berbagai pihak seperti PSM, pendamping PKH, dan RT/RW. Mekanisme ini mencerminkan adanya praktik triangulasi data sosial yang dapat meningkatkan keakuratan dan kepercayaan terhadap data kemiskinan. Di sisi lain, meskipun keurahan tidak memiliki anggaran langsung untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, Penengahan Raya mampu

memanfaatkan potensi lokal melalui kegiatan PKK dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Kegiatan seperti penanaman sayuran organik di pelataran masjid dan pemasaran hasilnya ke rumah sakit menunjukkan adanya inovasi berbasis sumber daya yang tersedia.

Komitmen lurah dan aparatur kelurahan dalam menjalankan program juga menjadi alasan penting. Mereka tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga aktif melakukan koordinasi dengan sektor swasta melalui program CSR dan membuka akses pekerjaan informal di fasilitas publik sekitar, seperti Rumah Sakit Abdul Moeloek. Evaluasi terhadap efektivitas program juga dilakukan secara rutin melalui forum RT dan diskusi bersama pendamping sosial, menunjukkan adanya siklus implementasi kebijakan yang dinamis dan partisipatif.

Oleh karena itu, Kelurahan Penengahan Raya dinilai layak menjadi lokasi penelitian karena dapat menggambarkan berbagai dimensi penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara nyata dan komprehensif.

Visi dan Misi

Visi : "Mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021- 2026 adalah : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat"

Misi : Mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021- 2026 Misi Kelurahan adalah : Misi ke-6 Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha

4.4.1 Tugas Dan Fungsi

Sebagai kepala pemerintahan di tingkat kelurahan, Lurah Penengahan Raya memiliki tugas pokok yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Tugas pokok ini mencakup:

1. Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Dilimpahkan oleh Walikota:

Lurah bertindak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Bandar Lampung di tingkat kelurahan. Sebagian kewenangan daerah, seperti dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan, perizinan tertentu skala kelurahan, dan pengelolaan lingkungan tingkat kelurahan, dilimpahkan kepada

Lurah untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan tugas ini harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

2. Melaksanakan Tugas Pemerintahan Lainnya Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:** Selain tugas yang dilimpahkan, Lurah juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota. Hal ini bisa mencakup tugas-tugas terkait ketertiban umum, keamanan, sosial, dan pembangunan di wilayah kelurahan.

Fungsi Kelurahan Penengahan Raya:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kelurahan Penengahan Raya memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan: Fungsi ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan. Ini termasuk pengelolaan data kependudukan, penataan wilayah, pengelolaan keuangan kelurahan penyusunan laporan, dan kegiatan administratif lainnya yang mendukung jalannya pemerintahan kelurahan.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Kelurahan memiliki peran aktif dalam meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemberdayaan ini diwujudkan melalui:
 - a. Mendorong pembentukan dan pengembangan organisasi masyarakat seperti RT/RW, karang taruna, kelompok PKK, dan kelompok

lainnya.

- b. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, seperti pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan.
 - c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan.
 - d. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
3. Pelayanan Masyarakat: Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama kelurahan. Kelurahan Penengahan Raya menyediakan berbagai jenis pelayanan, terutama pelayanan administrasi, untuk memenuhi kebutuhan warga. Berdasarkan informasi dari situs resmi, beberapa pelayanan yang diberikan meliputi:
- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan: Penerbitan Surat Pindah, Surat Keterangan Kematian.
 - b. Pelayanan Administrasi Umum: Penerbitan Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Bersih Diri, Surat Pengantar Nikah/NA, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Waris. Pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Kelurahan berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada seluruh warga.
4. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Kelurahan bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di wilayahnya. Fungsi ini dilaksanakan melalui:
- a. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
 - b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait kesadaran hukum dan pentingnya menjaga ketertiban lingkungan.
 - c. Memfasilitasi penyelesaian masalah atau konflik di tingkat

masyarakat secara musyawarah dan mufakat.

- d. Mengaktifkan peran satuan perlindungan masyarakat (Linmas) dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban.
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pelayanan Umum: Kelurahan memiliki peran dalam menjaga dan memelihara infrastruktur dan fasilitas publik yang ada di wilayahnya, seperti jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, dan fasilitas pelayanan lainnya. Meskipun kewenangan utama pengelolaan infrastruktur berada di tingkat kota, kelurahan dapat melakukan pemeliharaan ringan dan melaporkan kerusakan atau kebutuhan perbaikan kepada instansi terkait.
6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan: Kelurahan memiliki fungsi untuk membina dan mengawasi kegiatan berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
7. Koordinasi dengan Instansi Lain: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kelurahan Penengahan Raya perlu melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai perangkat daerah (PD), unit kerja perangkat daerah (UKPD) di tingkat kota, serta instansi pemerintah pusat atau swasta terkait. Koordinasi ini penting untuk sinergi dalam pelaksanaan program dan penyelesaian berbagai permasalahan di tingkat kelurahan.
8. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Camat atau Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
Selain fungsi-fungsi di atas, Lurah juga dapat diberikan tugas-tugas lain oleh Camat selaku atasan langsung atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas ini disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di tingkat kota dan kelurahan.
Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*) Ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Orientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha: Ini menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama.

4.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 10 struktur organisasi kelurahan peneggahan raya



(Sumber: Kelurahan Peneggahan Raya)

Susunan organisasi Kelurahan Peneggahan Raya Kota Bandar Lampung terdiri dari:

1. Camat
2. Lurah
3. Sekertaris
 - a. Babinkamtibmas
 - b. Plkb
 - c. Babinsa
4. Kasi Pemerintahan
 - a. Kasi Tantib
 - b. Kasi PEMB & PMK
5. Kasi Pemerintahan
 - a. Staff

b. Staff

Sebagai perangkat pemerintah yang berada di garis terdepan, Kelurahan Penengahan Raya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan struktur organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kelurahan berfungsi sebagai pelaksana sekaligus penghubung antara kebijakan makro dan kondisi sosial di tingkat mikro. Dalam konteks teori George Edward III, posisi kelurahan mencerminkan pentingnya komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, dan wewenang yang proporsional agar kebijakan dapat diimplementasikan secara nyata dan tepat sasaran. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini akan menyoroti sejauh mana kelurahan dapat menjalankan peran tersebut dalam kondisi sumber daya yang ada.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung telah diimplementasikan dengan capaian yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, di mana berdasarkan data BPS, angka kemiskinan menurun dari 8,81% pada tahun 2020 menjadi 7,77% pada tahun 2023. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya melalui BAPPERIDA, telah memberikan dampak positif meskipun belum sepenuhnya maksimal.
2. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berjalan optimal, berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi:
 - a. Komunikasi: Mekanisme penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat masih mengalami hambatan, terutama dalam hal konsistensi dan kejelasan informasi. Selain itu, koordinasi antarlembaga belum berjalan secara efektif, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan program di lapangan.
 - b. Sumber Daya: Terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang kompeten serta kurangnya alokasi anggaran yang memadai. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh.

- c. Disposisi (Komitmen Pelaksana): Meskipun disposisi pelaksana mulai menunjukkan perkembangan yang positif, namun belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan pelaksana yang kurang menunjukkan inisiatif dan keterlibatan aktif, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program di tingkat teknis.
- d. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program sudah terbentuk melalui keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Namun, struktur ini masih bersifat kaku dan berjenjang, yang menyebabkan lambatnya proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Padahal, isu kemiskinan menuntut respons yang cepat, terpadu, dan kolaboratif lintas sektor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh keterpaduan komunikasi yang efektif, kecukupan sumber daya yang mendukung, komitmen pelaksana yang merata, serta struktur birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh BAPPERIDA Kota Bandar Lampung tahun 2023, disampaikan beberapa saran berikut agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran:

1. Perbaikan Komunikasi Antarinstansi dan ke Masyarakat
Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar-OPD melalui forum rutin dan memanfaatkan media digital serta peran RT/RW dalam menyampaikan informasi program secara jelas dan konsisten.
2. Peningkatan Kapasitas dan Distribusi SDM
Penambahan tenaga teknis di bidang data dan sosial, serta pelatihan berkala bagi pelaksana program sangat penting untuk mendukung implementasi di lapangan, khususnya di kelurahan dengan angka kemiskinan tinggi.

3. Penguatan Komitmen Pelaksana

Evaluasi kinerja secara periodik dan pemberian insentif berbasis capaian perlu diterapkan untuk meningkatkan tanggung jawab dan inisiatif pelaksana kebijakan.

4. Penyederhanaan Struktur dan Koordinasi TKPKD

SOP pelaksanaan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. TKPKD didorong lebih aktif melalui jadwal koordinasi tetap dan pengawasan lintas sektor secara berkala.

5. Pelibatan Masyarakat dalam Program

Dibutuhkan forum warga di tingkat kelurahan untuk menjaring masukan dan pengawasan masyarakat secara langsung, serta kanal pengaduan yang mudah diakses.

6. Alokasi Anggaran Berbasis Data dan Prioritas Strategis

Perencanaan dan penggunaan anggaran harus berbasis pada data kemiskinan terbaru dan difokuskan pada sektor pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dengan pengawasan anggaran yang ketat dan transparan.

Saran ini diharapkan dapat menjadi tindak lanjut konkret untuk menyempurnakan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan mendukung pencapaian Tujuan SDGs di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. (2012). *Kebijakan publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Abikusna, R. Agus. (2019). “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. *Sosfilkom* 13, no. 01.
- Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya. 1(April), 43–50.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Alfisyahrin, D. (2021). Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan. *Jurnal Media Administrasi*, 3, 89–99.
- Anderson, JE (1978). *Public policymaking* (edisi ke-3). New York: Holt, Rinehart dan Winston.
- Arifin, A. (2017). Strategi Manajemen Perubahan Dalam Meningkatkan Disiplin Diperguruan Tinggi. *Edutech Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3 No 1(1), 117–132.
- Arifin, R. (2011). *Administrasi publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsa, Y., Wiratmo, Doktor, P., Administrasi, I., & Bandung, U. P. (2016). *implementasi PP 18 Tahun 2016 dan implikasinya terhadap kebijakan kepegawaian daerah*. 71–84.
- Dunn, WN (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Terj. M Riant Nugroho). Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada.
- Fahm, A. J. (2021). Isu Strategis Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kal Serang. *Desanta (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 1, 78–93.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Herdiana, Dian. (2018). “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep

- Dasar". *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1 no. 03.
- Hernandez, M. Hernandez, M. (2022). *Effective Policy Implementation: Strategies and Challenges. Journal of Public Administration*, 2022.
- Kartono, K. (1997). *Pendidikan sepanjang hayat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- L. N, Gerston. 1992. *Public Policy Making in A Democratic society: A Guide to CIVIC Engagement*. New York: M.E Sharp.
- Leiwakabessy, T. F. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Proses Pelaporan Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Sosial Humaniora P-ISSN*, 11(1), 2550–0236
- Lukman, Marcus dalam Mohammad Yuhdi. (2013). "Peran Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, Volume 15 no. 1.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2009). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang* . Jakarta: Elex Media Komputindo.
- (2012). *Kebijakan publik* . Jakarta: Elex Media Komputindo.
- P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Pewarna, TR (2011). Dalam Thoha, M. (2011). *Perilaku birokrasi* . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications.
- Remi, S., & Tjiptoherijanto, P. (2002). *Kemiskinan dan str penanggulangannya* .Jakarta: UI Pers.
- Sahir, syafriha hafni. (2022). *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022* (Try Koryati, Ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Soeharto, E., dkk. (2004). *Pembangunan kesejahteraan sosial*. Bandung: Alfabeta

- Sumaryadi, I. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat* . Jakarta: Citra Utama.
- Telaumbanua, F., Ndraha Strategi Pemerintah, A., Telaumbanua, F., Beniah Ndraha, A., Kunci, K., Daerah, P., & Manajemen, E. (2023). *PERSPEKTIF EKOLOGI MANAJEMEN DI KABUPATEN NIAS*.
- Wahab, SA (2006). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, SA (2012). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi* .Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibawa, S. (2000). *Kebijakan publik: Formulasi implementasi dan evaluasi* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik* . Malang: Penerbitan Bayumedia.
- , (2011). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era otonomi daerah* . Surabaya: Insan Cendekia.
- Winarno, B. (2005). *Kebijakan publik: Teori dan proses* . Yogyakarta: MedPress.